

Sorong, 10 April 2026

Nomor : 6/SPny/BPP-PBD/SOQ/IV/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Laporan Bulanan BPP
Periode Bulan Maret 2026**

Kepada Yth.
Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK (sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi) Badan Pengarah Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022, serta menindaklanjuti Surat Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura Nomor S3/SETBPP/JYP/JYP.02/2025 tanggal 5 Februari 2025 hal Pedoman Penyampaian Laporan Bulanan Percepatan Pembangunan Papua, bersama ini kami sampaikan **Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya periode bulan Maret 2026**.


Laporan tersebut memuat uraian pelaksanaan tugas dan fungsi BPP yang meliputi aspek kelembagaan, pelaksanaan SHEK pada masing-masing misi percepatan pembangunan Papua (Sehat, Cerdas, Produktif, Damai/Polhukam), dokumentasi kegiatan, capaian kinerja, identifikasi permasalahan dan tantangan, serta rekomendasi tindak lanjut sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang solutif.

Adapun dokumen laporan dimaksud dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1jD1MG3u82B-B72tVwmaREmbOk7M6le8v?usp=sharing>

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Atas perhatian dan dukungannya, kami ucapkan terimakasih.

**Anggota Badan Pengarah Papua
Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya,**



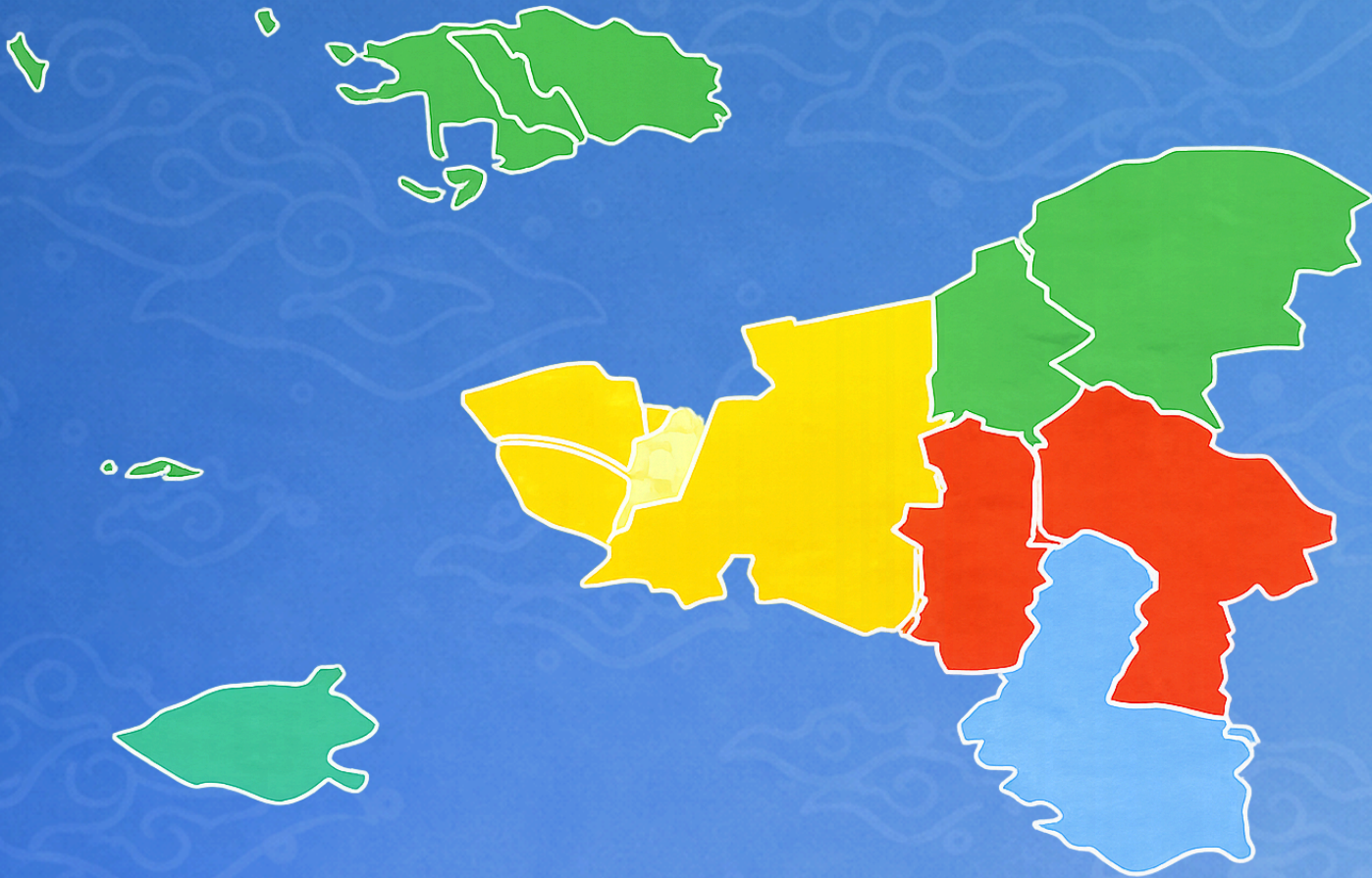
DRS. OTTO IHALAUW, MA

Tembusan:

1. Sekretariat Badan Pengarah Papua Manokwari
2. KPPN Sorong selaku Tim Dukungan Administratif Sekretariat Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI BADAN PENGARAH PAPUA PERIODE BULAN MARET 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Bulan Maret Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, laporan ini dimaksudkan sebagai bahan dokumentasi, evaluasi, serta masukan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan program strategis ke depan.

Selama periode Maret 2026, Badan Pengarah Papua Barat Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan yang meliputi fungsi pengarahan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan, dengan tetap mengedepankan prinsip keberpihakan kepada kepentingan masyarakat Papua Barat Daya, khususnya masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

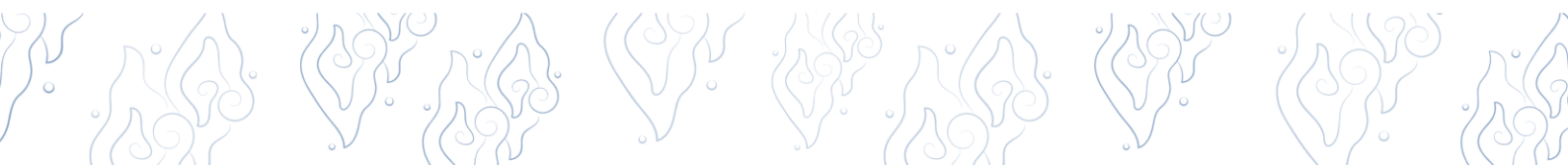
Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya pada periode selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua Barat Daya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat Daya.

Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Dasar Hukum (Landasan).....	4
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
BAB II KELEMBAGAAN BPP.....	7
2.1 Definisi BPP	7
2.2 Tugas BPP	7
2.3 Fungsi BPP.....	7
2.4 Struktur BPP	8
BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI.....	9
3.1 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Sehat.....	9
3.2 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Cerdas	16
3.3 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Produktif.....	37
3.4 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Polhukam (Damai)	60
3.5 Pelaksanaan SHEK Strategis (Gabungan Misi).....	82
BAB IV CAPAIAN, PERMASALAHAN, TANTANGAN.....	118
4.1 Capaian.....	118
4.2 Permasalahan.....	120
4.3 Tantangan	122
BAB V PENUTUP	124
5.1 Kesimpulan	124
5.2 Rekomendasi	125
5.3 Penutup.....	126



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum (Landasan)

- A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
- D. Kelembagaan Badan Pengarah Papua
 1. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
 2. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.
 3. Peraturan Ketua BPP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua.
 4. Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan BP3OKP.
 5. Keputusan Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- E. Arah Kebijakan Pembangunan Papua
 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
 2. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029.
 3. Peraturan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Maret 2026 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya, serta sebagai media dokumentasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode pelaporan.

2. Tujuan

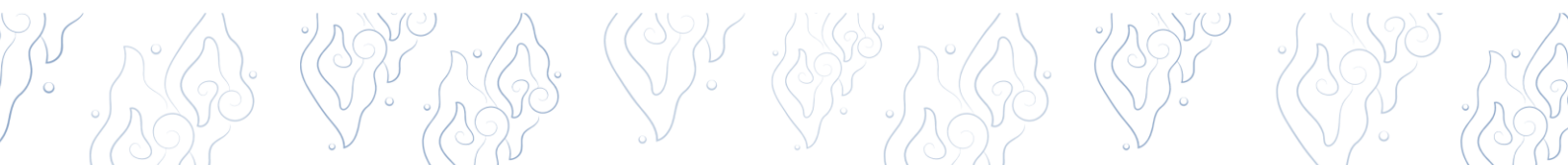
Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Menyajikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode Maret 2026.
2. Menggambarkan capaian, perkembangan, serta hasil kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam kerangka misi RIPP.
3. Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK Badan Pengarah.
4. Menyusun rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
5. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Barat Daya, khususnya masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

1.3 Ruang Lingkup

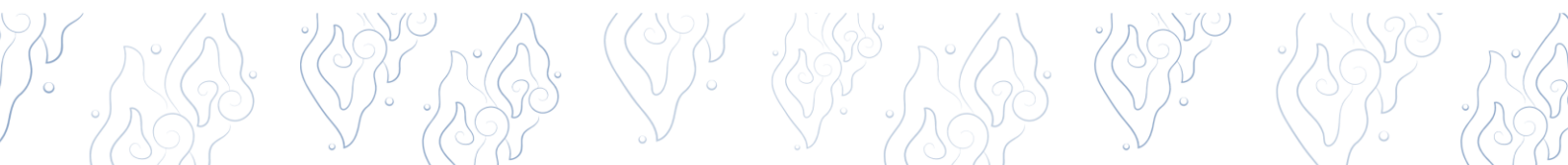
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Maret 2026 ini mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengarah di wilayah Provinsi Papua Barat Daya selama periode 1–31 Maret 2026. Ruang lingkup laporan meliputi:

1. Pelaksanaan pengarahan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap kebijakan dan program percepatan pembangunan serta Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.



2. Pelaksanaan kegiatan strategis dalam kerangka misi RIPPP.
3. Capaian yang diperoleh selama periode pelaporan, termasuk hasil koordinasi dan rekomendasi yang dihasilkan.
4. Identifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah.

Laporan ini disusun sebagai gambaran komprehensif atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode pelaporan, serta sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada periode berikutnya.



BAB II

KELEMBAGAAN BADAN PENGARAH PAPUA

2.1 Definisi BPP

1. Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1: Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
2. Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2: Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

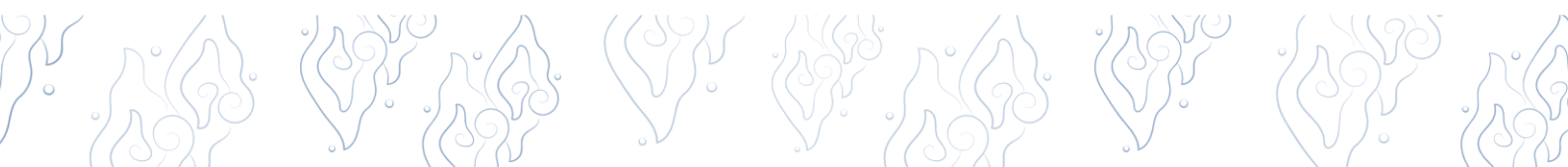
2.2 Tugas BPP

Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua bertugas untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Fungsi BPP

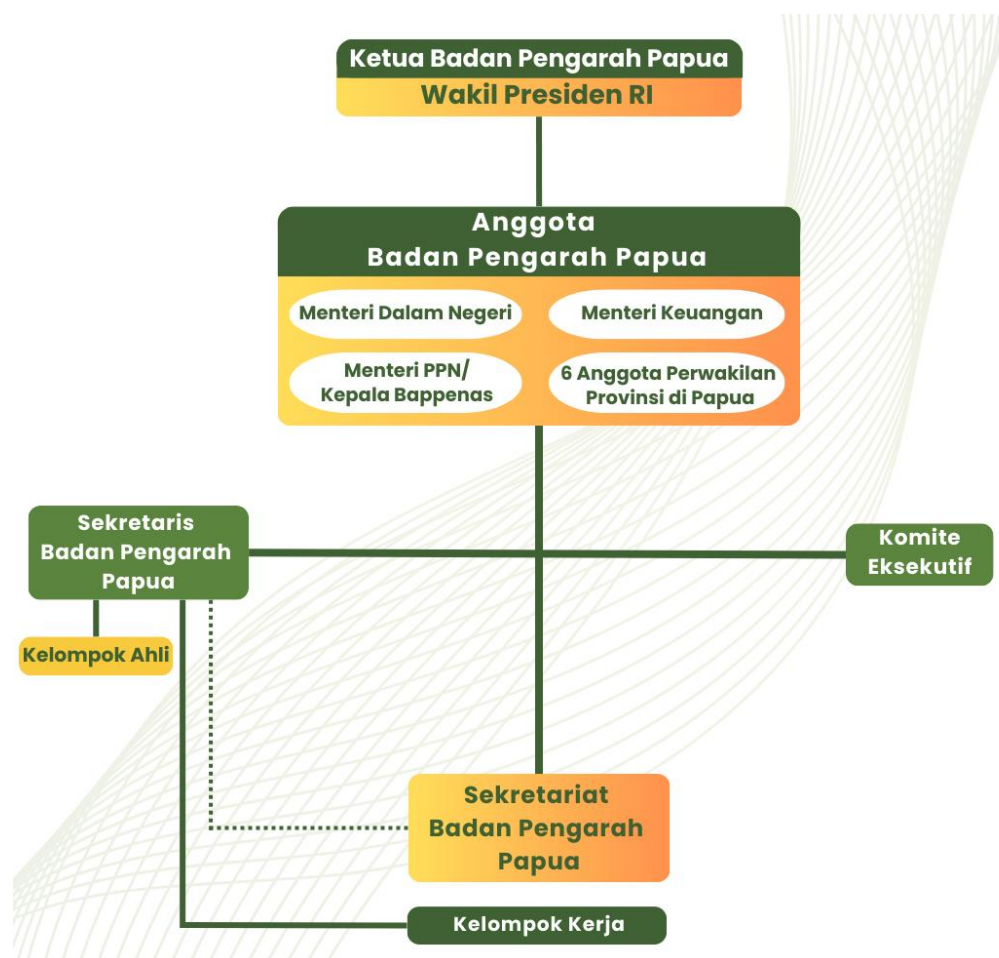
Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
- b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan



- percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
- c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
 - e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

2.4 Struktur BPP



BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Sehat

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kota Sorong: Pertemuan dengan BPKP Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 11 Maret 2026, bertempat di Kantor BPKP Perwakilan Papua Barat Daya
Latar Belakang	<p>Penertiban aset merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan lokasi keberadaan aset tersebut. Pemerintah Kota Sorong memiliki daftar aset yang berdasarkan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dilakukan pembenahan. Salah satu aset dimaksud adalah bekas gedung pertemuan milik Kabupaten Sorong yang saat ini telah berdiri bangunan bakal Rumah Sakit Siloam, yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2013 namun mengalami keterhentian (mangkrak) pasca pengalihan status kepemilikan dari Kabupaten Sorong kepada Kota Sorong.</p> <p>Berdasarkan hasil dialog dengan pihak-pihak terkait, disepakati bahwa pembangunan rumah sakit tersebut akan dilanjutkan. Namun demikian, untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pendampingan dan saran dari lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan pendampingan, dalam hal ini BPKP.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) melakukan pendampingan kepada Pemerintah</p>

	Kota Sorong dalam pertemuan dengan BPKP Papua Barat Daya.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi terkait kelanjutan pembangunan RS Siloam sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Kota Sorong. 2. Melakukan sinkronisasi agar pelaksanaan pembangunan RS sesuai dengan regulasi yang berlaku serta tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPKP Perwakilan Papua Barat Daya beserta jajaran 2. Sekretaris Daerah Kota Sorong 3. Anggota BPP Papua Barat Daya 4. Anggota Pokja Sehat BPP Papua Barat Daya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi dan koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan opsi-opsi yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Sorong guna menghindari potensi permasalahan hukum dalam kelanjutan pembangunan RS Siloam. 2. Pembahasan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Sorong agar pemanfaatan aset dapat berjalan optimal serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya.
Hasil Kegiatan	Disepakati untuk melakukan pendalaman bersama terhadap kasus tersebut, di mana BPP menyerahkan bahan/materi terkait pemanfaatan aset kepada BPKP untuk dipelajari lebih lanjut.

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap seluruh aspek regulasi serta potensi dampak yang ditimbulkan dalam rencana pemanfaatan lahan tersebut.
Dokumentasi	-

Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Visitasi dan SHEK Misi Papua Sehat: Lokus BLUD RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 17 Maret 2026, bertempat di BLUD RSUD Scholoo Keyen, Kabupaten Sorong Selatan
Latar Belakang	Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pendampingan lanjutan terhadap perencanaan program serta penyusunan rencana tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan evaluasi terhadap kondisi dan kesiapan pelayanan rumah sakit. 2. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. 3. Melakukan sinkronisasi program peningkatan pelayanan rumah sakit.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Sorong Selatan 2. Anggota BPP Papua Barat Daya 3. Dandim Sorong Selatan 4. Kapolres Sorong Selatan 5. Anggota Pokja Sehat BPP Papua Barat Daya 6. Direktur RSUD Scholoo Keyen beserta staf
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, evaluasi, dan koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat

Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arahan Bupati Sorong Selatan terkait persiapan rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 2. Arahan Anggota BPP terkait pentingnya menciptakan lingkungan kerja serta suasana pelayanan rumah sakit yang optimal. 3. Pembahasan kesiapan sarana dan prasarana, khususnya pembangunan gedung untuk pelayanan hemodialisa.
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya dialog antara Anggota BPP, Forkopimda, Direktur RSUD, serta jajaran staf terkait kondisi dan kebutuhan pengembangan layanan rumah sakit. 2. Dilaksanakannya kunjungan lapangan ke lokasi gedung yang direncanakan sebagai fasilitas pelayanan hemodialisa.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Perlu dilakukan evaluasi lanjutan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan untuk menilai progres peningkatan pelayanan dan kesiapan fasilitas rumah sakit.
Dokumentasi	-

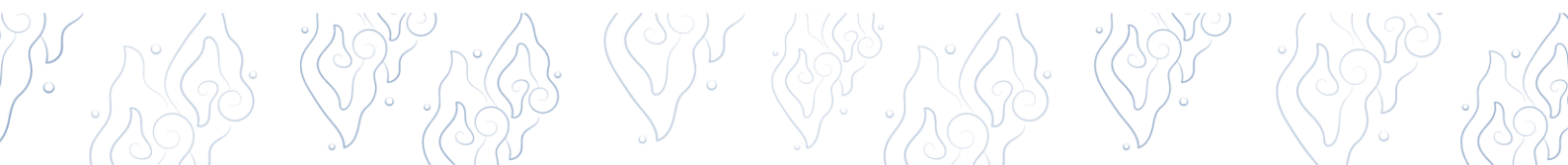
Kegiatan 3

Nama Kegiatan	Audiensi bersama Organisasi/LSM Kesehatan (Adinkes, Yapari, dan Yayasan Sorong Sehati)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 30 Maret 2026, bertempat di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Latar Belakang	Penyakit AIDS, Malaria, dan Tuberkulosis (ATM) masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya, termasuk di Kota Sorong dan wilayah sekitarnya. Tingginya angka kasus, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan,

	<p>serta faktor sosial dan budaya menjadi kendala dalam upaya penanggulangan penyakit tersebut.</p> <p>Organisasi masyarakat sipil/LSM seperti Adinkes, Yapari, dan Yayasan Sorong Sehati memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah melalui pendekatan berbasis komunitas, edukasi masyarakat, pendampingan pasien, serta penguatan layanan kesehatan.</p> <p>Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) sebagai lembaga yang memiliki fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) berperan penting dalam mengorkestrasi sinergi antara pemerintah dan LSM guna memperkuat penanganan penyakit ATM dalam kerangka Papua Sehat sesuai dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029.</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<p>Membangun koordinasi dan sinergi antara BP3OKP dan LSM kesehatan.</p> <p>Mengidentifikasi peran dan kontribusi LSM dalam penanganan penyakit ATM.</p> <p>Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi di lapangan.</p> <p>Mensinkronkan program LSM dengan kebijakan pemerintah daerah serta RAPPP.</p> <p>Menyusun langkah kolaborasi dalam penanganan penyakit ATM.</p>
<p>Peserta Kegiatan</p>	<p>BP3OKP Papua Barat Daya (Pokja Papua Sehat) bersama Organisasi/LSM Kesehatan, yaitu Adinkes, Yapari, dan Yayasan Sorong Sehati.</p>
<p>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</p>	<p>Sinkronisasi dan koordinasi</p>
<p>Misi/Keterangan</p>	<p>Papua Sehat</p>
<p>Poin-Poin Pembahasan</p>	<p>1. Kondisi dan tren penyakit ATM di Papua Barat Daya, meliputi data dan sebaran kasus AIDS, Malaria, dan</p>

	<p>Tuberkulosis, serta identifikasi kelompok rentan dan wilayah prioritas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peran LSM dalam penanganan ATM, termasuk edukasi dan sosialisasi kesehatan, pendampingan pasien, serta dukungan layanan kesehatan berbasis komunitas. 3. Permasalahan dan tantangan, antara lain stigma terhadap penderita HIV/AIDS, keterbatasan akses layanan kesehatan, kepatuhan pengobatan pasien, serta keterbatasan pendanaan program. 4. Sinkronisasi program dengan pemerintah, mencakup integrasi program LSM dengan Dinas Kesehatan, dukungan kebijakan daerah, serta peran BP3OKP dalam fungsi SHEK. 5. Strategi penguatan penanganan ATM, melalui pendekatan berbasis komunitas, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan sistem layanan kesehatan.
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya komunikasi dan koordinasi antara BP3OKP dan LSM kesehatan. 2. Teridentifikasinya peran dan kontribusi LSM dalam penanganan penyakit ATM. 3. Terpetakannya permasalahan utama yang dihadapi di lapangan. 4. Tercapainya kesepahaman untuk memperkuat sinergi dalam penanganan penyakit ATM. 5. Terbukanya peluang kolaborasi program antara pemerintah dan LSM.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kolaborasi antara LSM dan pemerintah daerah dalam program penanganan penyakit ATM. 2. Peningkatan edukasi dan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat guna mengurangi stigma. 3. Penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas melalui optimalisasi peran LSM.

	<ol style="list-style-type: none">4. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil.5. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi program ATM melalui mekanisme SHEK BP3OKP.6. Integrasi program penanganan ATM dalam RAPPP (Papua Sehat) dan dokumen perencanaan daerah.
<p>Dokumentasi</p>	




3.2 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Cerdas

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	SHEK Misi Papua Cerdas bersama Ketua Sinode GKI di Tanah Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 4 Maret 2026, bertempat di Kantor Sinode GKI di Tanah Papua, Jayapura
Latar Belakang	<p>Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) merupakan lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua. Penyelenggaraan pendidikan oleh YPK telah berlangsung sejak awal proses penginjilan di Tanah Papua.</p> <p>Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh satuan pendidikan (satdik) YPK di Tanah Papua, antara lain kekurangan tenaga pendidik serta lemahnya tata kelola yayasan. Kondisi ini berdampak pada kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Melaksanakan fungsi sinkronisasi terkait peran Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang dikelolanya.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua III Badan Pekerja Sinode (BPS) GKI di Tanah Papua 2. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) beserta 4 (empat) orang pengurus 3. Anggota BPP Papua Barat Daya 4. Perwakilan Pokja Sehat, Cerdas, dan Produktif (3 orang) BPP PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi dan koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas

<p>Poin-Poin Pembahasan</p>	<p>Kegiatan diawali dengan penyambutan oleh Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin oleh Wakil Ketua III BPS GKI di Tanah Papua.</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, BPP Papua Barat Daya menyampaikan presentasi terkait kondisi YPK serta isu-isu strategis pembangunan pendidikan pada satuan pendidikan YPK di Papua Barat Daya (materi terlampir).</p>
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. YPK menyampaikan komitmen bahwa jumlah sekolah dan peserta didik yang besar seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi. Namun demikian, orientasi yayasan masih berfokus pada penerimaan hibah dari pemerintah daerah, dan belum mengembangkan pemikiran terkait optimalisasi sumber pendanaan lain, termasuk potensi Pendapatan Asli Yayasan (PAY) guna menunjang layanan pendidikan. 2. Hasil evaluasi yang disampaikan oleh Pokja Cerdas terkait kualitas serta rendahnya akuntabilitas tata kelola yayasan belum memperoleh respons yang signifikan dari pihak yayasan. 3. Disampaikan pula penjelasan mengenai dampak implementasi Sistem Satuan Harga (SSH) terhadap kualitas layanan satuan pendidikan YPK, serta pentingnya peran warga GKI yang diberdayakan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan analisis dan penyusunan rekomendasi terkait kualitas layanan satuan pendidikan YPK di Papua Barat Daya oleh BPMP sebagai bentuk komitmen BPP sebagai Badan Pengarah.

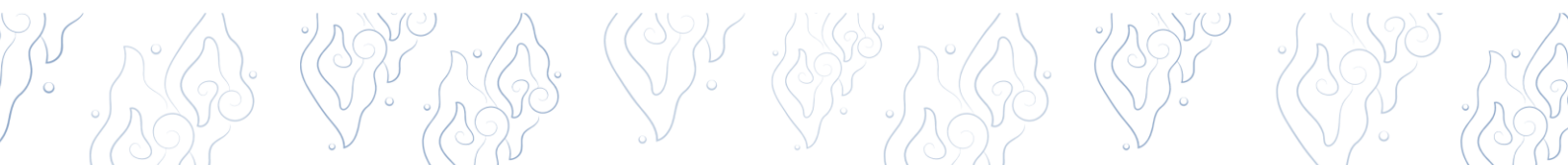
	2. Diperlukan penyusunan regulasi khusus terkait yayasan pionir dan/atau pengelolaan hibah kepada yayasan penyelenggara pendidikan di Tanah Papua.
Dokumentasi	

Kegiatan 2

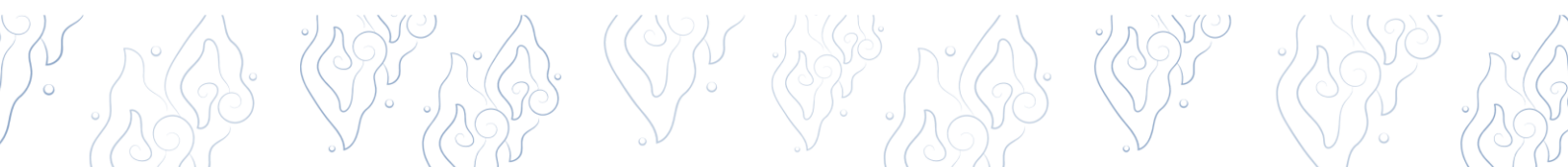
Nama Kegiatan	Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu-Jum'at, 4-6 Maret 2026 di Vega Hotel Sorong
Latar Belakang	<p>Konsolidasi daerah pendidikan dasar dan menengah merupakan forum strategis dalam menyelaraskan kebijakan, program, serta arah pembangunan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah.</p> <p>Dalam konteks Papua Barat dan Papua Barat Daya, peningkatan kualitas pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam pencapaian indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai bagian dari misi Papua Cerdas dalam RAPPP 2025–2029.</p> <p>Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, sinkronisasi, serta pemahaman bersama terhadap kebijakan pendidikan, termasuk integrasi program pusat dan daerah agar lebih terarah, terukur, dan berdampak</p>

	nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Papua Barat Daya.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti kegiatan konsolidasi pendidikan dasar dan menengah tahun 2026. 2. Memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder pendidikan. 3. Mensosialisasikan peran BP3OKP dalam fungsi SHEK di sektor pendidikan. 4. Mendorong integrasi kebijakan pendidikan dengan RIPP dan RAPP. 5. Mendukung pencapaian indikator Papua Cerdas, khususnya RLS dan HLS.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah / BPMP 2. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 4. BP3OKP Papua Barat Daya 5. Stakeholder pendidikan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan agenda dan rundown kegiatan konsolidasi. 2. Pembahasan dalam sidang komisi, di mana BP3OKP Papua Barat Daya tergabung dalam Komisi V, yang relevan dengan indikator Papua Cerdas, khususnya RLS dan HLS. 3. Penyampaian materi oleh BP3OKP Papua Barat Daya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan BP3OKP dan peran strategisnya

	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi) • Pentingnya integrasi program pendidikan dengan RIPPP dan RAPPP <ol style="list-style-type: none"> 4. Penegasan bahwa seluruh program dan kegiatan pendidikan harus mengacu pada dokumen perencanaan utama, yaitu RIPPP dan RAPPP, agar capaian pembangunan lebih terarah dan terukur. 5. Pembahasan hasil sidang komisi, termasuk rekomendasi dan rencana aksi yang disepakati bersama antara OPD teknis (Dinas Pendidikan) dan BPMP. 6. Peran BP3OKP sebagai lembaga pengarah dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan • Pengawasan • Evaluasi • Pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan rencana aksi pendidikan
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan konsolidasi pendidikan dasar dan menengah tahun 2026 sesuai dengan agenda. 2. Terbangunnya pemahaman bersama mengenai pentingnya integrasi program pendidikan dengan RIPPP dan RAPPP. 3. Meningkatnya peran BP3OKP sebagai lembaga pengarah dalam fungsi SHEK di sektor pendidikan. 4. Teridentifikasinya langkah-langkah strategis dalam mendukung pencapaian indikator RLS dan HLS di Papua Barat Daya. 5. Disepakatinya rencana aksi bersama antara OPD teknis dan BPMP dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.



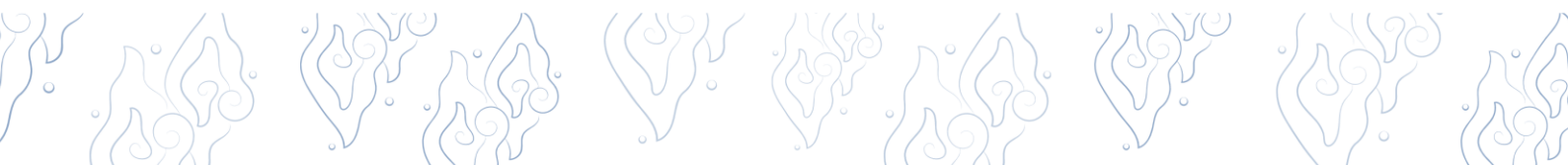
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan konsolidasi pendidikan dasar dan menengah tahun 2026 sesuai dengan agenda. 2. Terbangunnya pemahaman bersama mengenai pentingnya integrasi program pendidikan dengan RIPP dan RAPP. 3. Meningkatnya peran BP3OKP sebagai lembaga pengarah dalam fungsi SHEK di sektor pendidikan. 4. Teridentifikasinya langkah-langkah strategis dalam mendukung pencapaian indikator RLS dan HLS di Papua Barat Daya. 5. Disepakatinya rencana aksi bersama antara OPD teknis dan BPMP dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
<p>Dokumentasi</p>	



Kegiatan 3

Nama Kegiatan	Rapat Kerja Tahun Anggaran 2026 Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Mesias Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Sabtu, 7 Maret 2026, bertempat di Aimas Hotel, Kabupaten Sorong
Latar Belakang	<p>Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Mesias Sorong merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Kristen.</p> <p>Dalam rangka pengembangan institusi, diperlukan kesepahaman dan penyelarasan gagasan dalam penyusunan rencana kerja serta target capaian kinerja STAKN Mesias Sorong Tahun Anggaran 2026. Kegiatan rapat kerja ini menjadi momentum strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan program prioritas lembaga.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Menghadiri kegiatan pembukaan Rapat Kerja STAKN Mesias Sorong Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari upaya koordinasi dan dukungan terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 7. Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI 8. Anggota BPP Papua Barat Daya 9. Pokja Papua Cerdas BPP Papua Barat Daya 10. Ketua STAKN Mesias Sorong beserta staf pengajar
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas

<p>Poin-Poin Pembahasan</p>	<p>Kegiatan diawali dengan agenda pembukaan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sambutan Gubernur Papua Barat Daya yang disampaikan oleh Asisten II Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. 2. Sambutan dan arahan Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI sekaligus secara resmi membuka kegiatan Rapat Kerja.
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Rapat Kerja STAKN Mesias Sorong Tahun Anggaran 2026 telah resmi dibuka dan akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari di Aimas Hotel, Kabupaten Sorong. 2. STAKN Mesias Sorong menyampaikan komitmen untuk mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga dosen dan tenaga kependidikan. 3. STAKN Mesias Sorong juga mengharapkan dukungan dari BPP Papua Barat Daya dan pemerintah daerah dalam perencanaan serta peningkatan kualitas pembelajaran.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<p>Perlu direncanakan audiensi lanjutan antara BPP Papua Barat Daya dengan STAKN Mesias Sorong dalam rangka memperkuat koordinasi dan dukungan terhadap pengembangan institusi.</p>



Dokumentasi



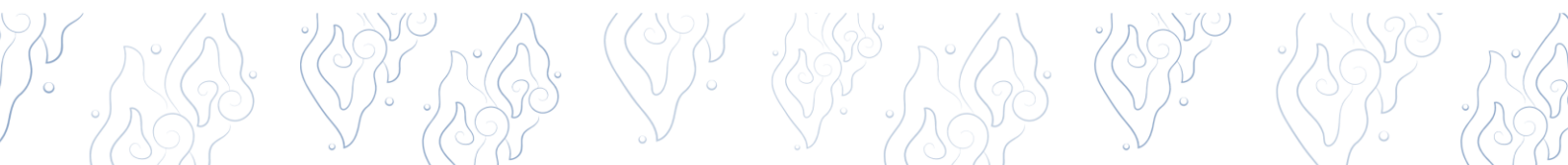
Kegiatan 4

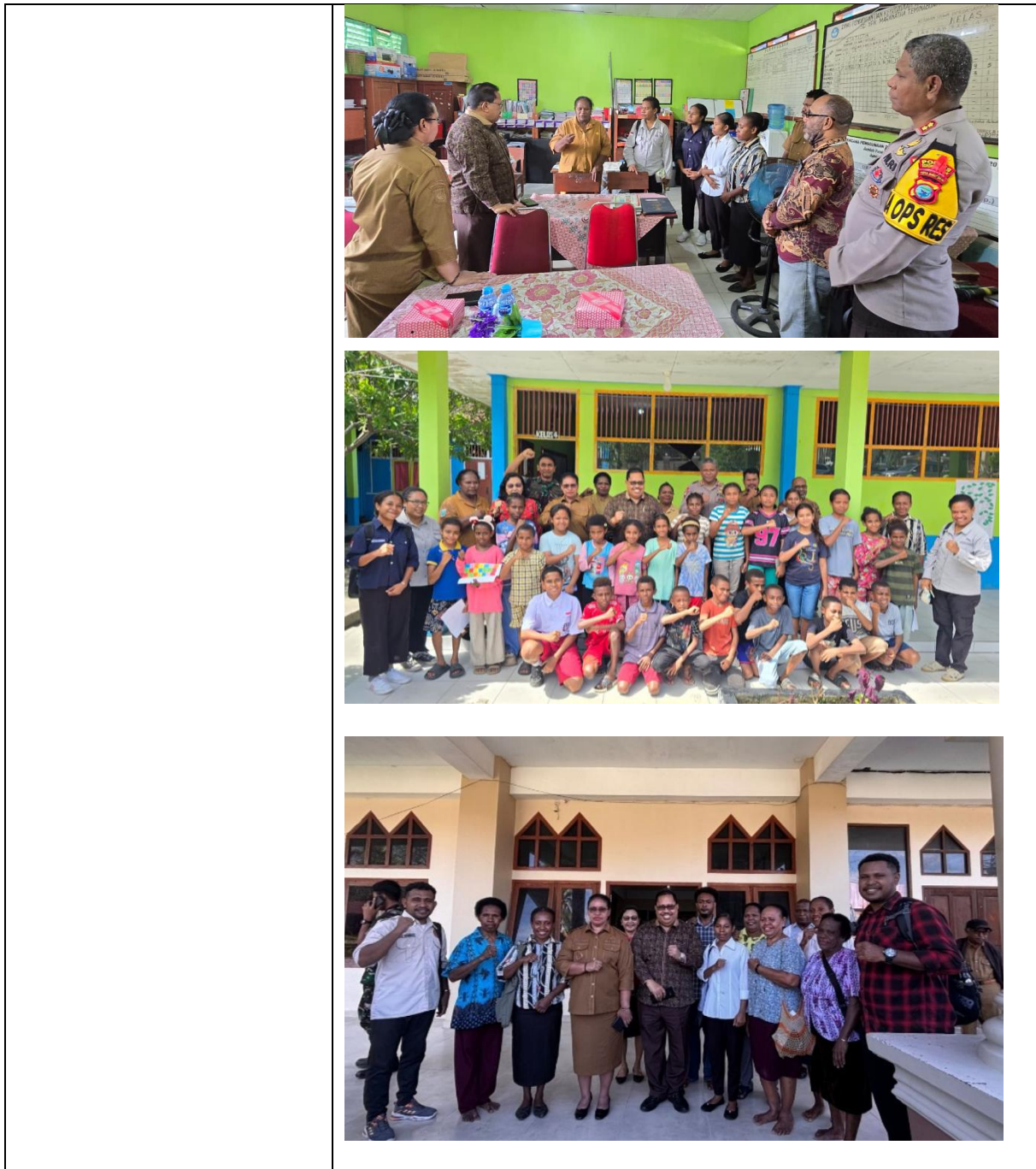
Nama Kegiatan	Visitasi dan SHEK Misi Papua Cerdas dan Produktif (SSH dan MBG): Lokus Gereja & SD YPK 1 Maranatha Teminabuan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 17 Maret 2026, bertempat di Gereja dan SD YPK 1 Maranatha Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan
Latar Belakang	Sekolah Sepanjang Hari (SSH) merupakan salah satu program percepatan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029. Program ini dirancang sebagai upaya strategis dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), khususnya melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik.

	<p>Kabupaten Sorong Selatan menjadi salah satu lokus pengembangan program SSH, dengan beberapa titik pelaksanaan, antara lain SD YPK 1 Maranatha Teminabuan, SD Inpres 11 Konda, dan SD YPK Mobarak Sodrofoyo.</p> <p>SD YPK 1 Maranatha Teminabuan merupakan salah satu lokus utama yang tidak hanya mengimplementasikan program SSH, tetapi juga mengintegrasikan program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga menjadi contoh kolaborasi program dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan peserta didik.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Melaksanakan visitasi dalam rangka fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap pelaksanaan program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) pada lokus SD YPK 1 Maranatha Teminabuan.
Peserta Kegiatan	<p>Peserta Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan BPP Papua Barat Daya 2. Pokja Papua Cerdas BPP Papua Barat Daya 3. Bupati Sorong Selatan 4. Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan 5. Kepala Sekolah dan Tim SSH
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Evaluasi dan koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan ke satuan pendidikan (SD YPK 1 Maranatha Teminabuan), meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Audiensi bersama kepala sekolah dan guru terkait pelaksanaan program SSH

	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dampak program terhadap peserta didik dan sekolah • Pengenalan tim dan pengelola program SSH <p>2. Kunjungan ke lokus dapur SSH, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan lokasi dan fasilitas dapur SSH • Pengenalan pengelola dapur dan mekanisme operasional
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program SSH di SD YPK 1 Maranatha Teminabuan telah dilaksanakan sejak akhir tahun 2025, diawali dengan tes awal kemampuan akademik siswa. Hasil awal menunjukkan masih banyak siswa yang belum memiliki kemampuan dasar membaca dan memahami bacaan secara optimal. 2. Setelah pelaksanaan semester gasal Tahun 2025, terjadi peningkatan yang signifikan pada kemampuan akademik siswa, disertai dengan perubahan positif pada aspek kedisiplinan dan pembentukan karakter. 3. Terdapat integrasi program antara SSH dan MBG pada lokus ini, yang memberikan dampak positif berupa efisiensi pembiayaan serta peningkatan kualitas layanan, termasuk adanya potensi penghematan anggaran yang dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas siswa dan pengelola program. 4. Kunjungan ke dapur SSH yang berlokasi di Gedung Gereja GKI Maranatha Teminabuan menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan gereja. Disampaikan bahwa program ini turut berdampak pada peningkatan kesehatan siswa, yang ditandai dengan menurunnya kebutuhan pelayanan diakonia bagi anak-anak (PAR). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi gizi siswa, meskipun masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut secara komprehensif.

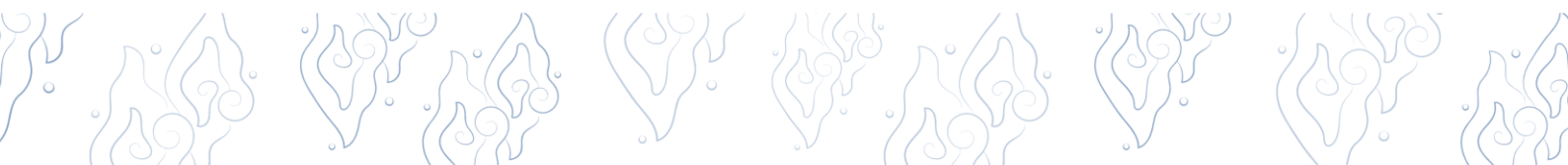
	<p>5. Pemanfaatan ruang dilakukan secara optimal, mencakup fungsi sebagai gudang, ruang makan, ruang memasak, serta ruang belajar (termasuk 2 ruang untuk kelas penyetaraan), dengan total penggunaan 4 ruang utama dan tambahan area teras untuk dapur basah dan kering.</p> <p>6. Tim pelaksana SSH terdiri atas pengawas lapangan, pendamping siswa pada masing-masing sekolah, serta tenaga pengelola dapur yang berasal dari anggota Persekutuan Wanita (PW) GKI Maranatha Teminabuan. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program, sekaligus memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal melalui sistem honorarium berbasis rekening individu.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<p>1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi pengelola dapur dan pendamping siswa guna mendukung kualitas pelaksanaan program.</p> <p>2. Optimalisasi pemanfaatan ruang dan kelas penyetaraan dalam rangka menekan angka putus sekolah di wilayah Distrik Teminabuan.</p>
<p>Dokumentasi</p>	





Kegiatan 5

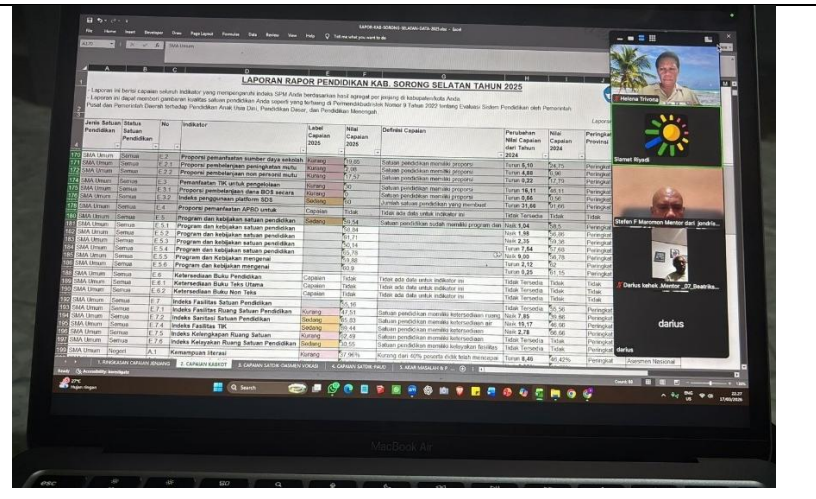
<p>Nama Kegiatan</p>	<p>Rapat Virtual bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan dan BPMP Papua Barat: Identifikasi Akar Masalah Penurunan SPM Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p>	<p>Selasa, 17 Maret 2026, dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting</p>



Latar Belakang	<p>Dalam pelaksanaan tugas Pokja Papua Cerdas, fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) perlu didukung dengan identifikasi permasalahan secara komprehensif. Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian adalah penurunan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan.</p> <p>Oleh karena itu, diperlukan koordinasi bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan dan BPMP Papua Barat untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan capaian SPM pendidikan.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya capaian SPM pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja Papua Cerdas BPP Papua Barat Daya 2. Perwakilan BPMP Papua Barat (Bapak Yadi) 3. Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan 4. Kepala Seksi Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Harmonisasi dan evaluasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan terkait penurunan capaian SPM pendidikan tahun 2025 dari 58% menjadi 49%. 2. Penjelasan dari BPMP Papua Barat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian SPM pendidikan.
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekitar 85% satuan pendidikan tidak melakukan input data pada sistem yang tersedia, sehingga sistem membaca data sebagai tidak tersedia. 2. Adanya penambahan indikator baru sesuai program nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan

	<p>Menengah yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam penilaian SPM tahun 2025.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Keterbatasan SDM pengelola data, di mana fungsi pengendalian dan evaluasi SPM yang seharusnya dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kurikulum belum berjalan optimal karena jabatan tersebut belum terisi. 4. Tingginya beban tugas pada Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah yang tidak diimbangi dengan dukungan manajerial yang memadai. 5. Adanya beban pembiayaan pada bidang kebudayaan yang tidak secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan capaian SPM pendidikan.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu penguatan fungsi pengendalian dan evaluasi oleh manajemen, minimal pada level Kepala Bidang, serta penerapan sistem reward dan punishment bagi OPD maupun satuan pendidikan guna meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas kinerja. 2. Pengisian jabatan Kepala Seksi Kurikulum sebagai fungsi strategis dalam pengelolaan dan evaluasi SPM pendidikan. 3. Penataan kelembagaan dengan membagi jabatan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi dua, yaitu bidang Pendidikan Dasar dan bidang Pendidikan Menengah. 4. Peninjauan kembali struktur organisasi bidang kebudayaan, termasuk kemungkinan pengalihan urusan ke Dinas Pariwisata sesuai kebutuhan organisasi dan efektivitas pencapaian SPM pendidikan.


Dokumentasi



Kegiatan 6

<p>Nama Kegiatan</p>	<p>Rapat Koordinasi Program Prioritas Kemendikdasmen dan Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Tahun 2026</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p>	<p>Minggu–Selasa, 29–31 Maret 2026, bertempat di Vega Hotel Sorong</p>
<p>Latar Belakang</p>	<p>Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Papua Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memiliki peran strategis dalam pengembangan kualitas guru dan tenaga kependidikan di daerah.</p> <p>Sebagai mitra BPP Papua Barat Daya, BGTK Papua Barat melibatkan BPP dalam kegiatan rapat koordinasi tahunan guna memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, khususnya melalui penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>Kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk menyosialisasikan program prioritas Kemendikdasmen serta memperkuat integritas kelembagaan melalui</p>

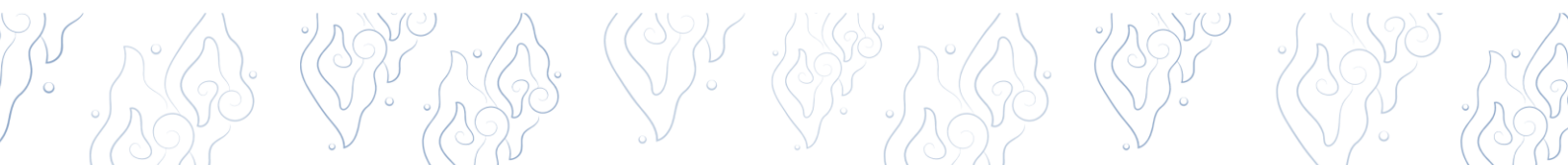
	<p>penancangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<p>Melaksanakan fungsi koordinasi bersama BGTK Papua Barat sebagai mitra dalam mendukung peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.</p>
<p>Peserta Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP Papua Barat Daya 2. Pokja Papua Cerdas BPP Papua Barat Daya dan BPP Papua Barat 3. Pimpinan dan staf BGTK Papua Barat 4. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota 5. Mitra pendidikan, antara lain UNICEF, perguruan tinggi swasta (PTS), dan perguruan tinggi negeri (PTN)
<p>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</p>	<p>Sinkronisasi dan koordinasi</p>
<p>Misi/Keterangan</p>	<p>Papua Cerdas</p>
<p>Poin-Poin Pembahasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan dan memberikan penguatan terhadap program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan guru dan tenaga kependidikan. 2. Membangun komitmen bersama antara BGTK Papua Barat dengan mitra, termasuk BP3OKP, UNICEF, dan perguruan tinggi. 3. Pelaksanaan penancangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) oleh BGTK Papua Barat.
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program prioritas Kemendikdasmen disampaikan oleh masing-masing penanggung jawab sebagai bagian dari penguatan kebijakan di daerah. 2. Dalam sesi pemaparan mitra, Pokja Papua Cerdas bersama UNICEF menyampaikan materi terkait indikator percepatan pembangunan Papua Cerdas,

	<p>khususnya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang sangat dipengaruhi oleh kinerja OPD teknis di tingkat kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Disampaikan bahwa pendampingan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, guna memastikan program pendidikan berjalan secara tepat, terukur, dan berdampak. 4. BPP Papua Barat Daya menegaskan perannya sebagai Badan Pengarah yang bertanggung jawab dalam pengawasan kinerja OPD teknis, serta komitmen untuk melaksanakan kerja sama (MoU) dengan BGTK Papua Barat dalam rangka pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Papua Barat Daya. 5. Upaya pemetaan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini dilakukan sebagai bagian dari optimalisasi implementasi Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang redistribusi guru, mengingat masih terdapat kekosongan tenaga guru, khususnya di sekolah swasta dalam dua tahun terakhir yang berdampak pada kualitas pembelajaran.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<p>Perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan pemetaan kebutuhan tenaga guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Papua Barat Daya sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan redistribusi dan peningkatan kualitas pendidikan.</p>
<p>Dokumentasi</p>	



Kegiatan 7

Nama Kegiatan	Rapat Persiapan Kepanitiaan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 31 Maret 2026, bertempat di Sekretariat BPP Papua Barat Daya (dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting)
Latar Belakang	Kongres Bahasa Daerah merupakan forum nasional yang dirancang sebagai wadah untuk merumuskan strategi pengembangan dan pelestarian bahasa daerah



	<p>di Indonesia. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 di Jayapura dan akan melibatkan 34 provinsi di seluruh Indonesia.</p> <p>Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, diperlukan pembentukan dan penetapan tim kerja kepanitiaan yang terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, daerah, serta pemangku kepentingan terkait.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Melaksanakan rapat koordinasi akhir dalam rangka penyusunan tim kerja kepanitiaan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP dari 6 (enam) provinsi 2. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI 3. Pokja Papua Cerdas BPP Papua Barat Daya 4. Biro Hukum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP dari 6 (enam) provinsi 2. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI 3. Pokja Papua Cerdas BPP Papua Barat Daya 4. Biro Hukum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan bahwa Surat Keputusan (SK) kepanitiaan akan dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan komposisi yang hanya memuat pejabat atau staf internal kementerian. 2. BPP ditetapkan dalam posisi sebagai pengarah dalam pelaksanaan kegiatan Kongres Bahasa Daerah.

	<p>3. BPP di masing-masing provinsi akan berperan secara teknis sebagai tim yang mendukung pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam membantu koordinasi antara panitia pusat dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menjelang pelaksanaan kegiatan pada bulan Agustus 2026 di Jayapura.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<p>Perlu dilaksanakan rapat lanjutan untuk membahas lebih rinci peran teknis BPP serta mekanisme koordinasi dengan panitia pusat dalam pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026.</p>
<p>Dokumentasi</p>	

3.3 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Produktif

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Pemantauan Harga Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis–Jumat, 5–6 Maret 2026, bertempat di Kota Sorong (Pasar Sentral Remu, Gudang Bulog, ritel modern, dan lokasi distribusi lainnya)
Latar Belakang	<p>Menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjadi salah satu isu strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Papua Barat Daya.</p> <p>Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui kegiatan pemantauan harga barang kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) melakukan langkah antisipatif guna memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di pasar. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat serta mendukung misi Papua Produktif dalam kerangka Otonomi Khusus.</p> <p>Dalam konteks tersebut, BP3OKP melaksanakan fungsi evaluasi dan koordinasi terhadap kebijakan pengendalian inflasi daerah, distribusi pangan, serta kesiapan logistik menjelang hari besar keagamaan.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. 2. Memantau dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar. 3. Mencegah terjadinya kelangkaan barang dan praktik panic buying. 4. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengendalian inflasi daerah.

	5. Memberikan kepastian kepada masyarakat terkait ketersediaan pangan.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau 2. Wakil Wali Kota Sorong, Anshar Karim 3. Tim Satgas Pangan Papua Barat Daya 4. Anggota Pokja Papua Produktif BP3OKP Papua Barat Daya 5. Perwakilan instansi terkait 6. Pengelola distribusi pangan dan ritel modern
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Evaluasi dan koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bahan pokok, menunjukkan bahwa stok beras, khususnya beras SPHP, dalam kondisi aman, serta ketersediaan minyak goreng mencukupi hingga ± 2 bulan ke depan. 2. Stabilitas harga kebutuhan pokok, di mana sebagian besar komoditas relatif stabil, meskipun terdapat kenaikan pada beberapa komoditas seperti daging ayam yang masih dalam batas wajar. 3. Distribusi dan rantai pasok pangan, mencakup evaluasi distribusi bahan pokok dari gudang ke pasar/ritel serta kesiapan pelaku usaha dalam menjaga pasokan menjelang HBKN. 4. Pengendalian perilaku konsumen, melalui imbauan kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak serta pencegahan praktik panic buying. 5. Koordinasi Tim Satgas Pangan, dalam menjaga sinergi antar instansi guna memastikan stabilitas pasokan dan harga. 6. Ketersediaan dan stabilitas BBM, di mana stok dan harga BBM di wilayah Kota Sorong dan Papua Barat Daya dalam kondisi aman dan stabil.

Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bahan pokok di wilayah Papua Barat Daya dinyatakan aman dan mencukupi hingga Hari Raya Idul Fitri. 2. Harga kebutuhan pokok secara umum stabil, dengan kenaikan terbatas pada beberapa komoditas tertentu. 3. Ketersediaan dan harga BBM di Kota Sorong dan Papua Barat Daya berada dalam kondisi aman dan stabil. 4. Sistem distribusi pangan berjalan dengan baik, didukung oleh ketersediaan stok di gudang, ritel, serta depot BBM. 5. Tidak ditemukan indikasi kelangkaan bahan pokok yang signifikan. 6. Masyarakat memperoleh kepastian bahwa tidak diperlukan pembelian secara berlebihan.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penguatan monitoring harga dan stok secara rutin hingga pasca Idul Fitri. 2. Mengoptimalkan peran Satgas Pangan dalam koordinasi lintas sektor pengendalian inflasi daerah. 3. Melakukan intervensi pasar terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga. 4. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait perilaku konsumsi yang bijak dan rasional. 5. Memastikan kelancaran distribusi pangan dan BBM guna menghindari hambatan logistik. 6. Menyusun strategi pengendalian harga pasca HBKN untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Dokumentasi	-


Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Pelantikan UPTD BLUD Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya
----------------------	---



Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 10 Maret 2026 di Kantor Gubernur Papua Barat Daya
Latar Belakang	<p>Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Raja Ampat merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia serta menjadi penopang utama sektor pariwisata dan ekonomi berbasis kelautan di Papua Barat Daya.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Skema BLUD diharapkan mampu memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi pemanfaatan potensi kawasan secara berkelanjutan.</p> <p>Pelantikan UPTD BLUD KKPD Raja Ampat menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola konservasi perairan, meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan agenda Papua Produktif dan Papua Sehat dalam kerangka RAPPP 2025–2029.</p> <p>BP3OKP melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) berperan dalam memastikan pengelolaan kawasan konservasi berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadiri dan menyaksikan pelantikan UPTD BLUD KKPD Raja Ampat. 2. Mendukung penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

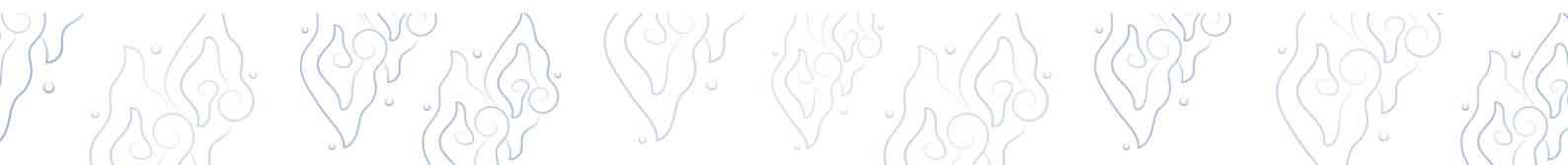
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mendorong optimalisasi pengelolaan kawasan berbasis BLUD. 4. Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pengelola kawasan, dan stakeholder terkait. 5. Mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam kerangka Papua Produktif.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur Papua Barat Daya 2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya 3. Pimpinan dan pejabat OPD terkait (Dinas Kelautan dan Perikanan, dll) 4. BP3OKP Papua Barat Daya 5. Perwakilan instansi vertikal dan stakeholder terkait 6. Pimpinan dan jajaran UPTD BLUD KKPD Raja Ampat yang dilantik
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dan sinkronisasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelantikan dan penguatan kelembagaan UPTD BLUD KKPD Raja Ampat, sebagai unit pengelola kawasan konservasi perairan. 2. Peran strategis KKPD Raja Ampat, dalam menjaga kelestarian ekosistem laut serta mendukung sektor pariwisata dan ekonomi berbasis kelautan. 3. Implementasi pola pengelolaan BLUD, yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas layanan. 4. Pengelolaan kawasan konservasi berkelanjutan, termasuk perlindungan biodiversitas laut dan pemanfaatan sumber daya secara bijak. 5. Sinergi lintas sektor, antara pemerintah daerah, pengelola kawasan, dan stakeholder dalam pengelolaan KKPD.

<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pelantikan UPTD BLUD KKPD Raja Ampat sebagai unit pengelola kawasan konservasi perairan. 2. Terbangunnya komitmen pemerintah daerah dalam penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi. 3. Meningkatnya koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. 4. Teridentifikasinya peran strategis BLUD dalam mendukung pengelolaan kawasan secara efektif dan berkelanjutan. 5. Menguatnya arah kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang mendukung ekonomi daerah dan kelestarian lingkungan.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM UPTD BLUD KKPD Raja Ampat. 2. Penyusunan rencana pengelolaan kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan. 3. Optimalisasi pengelolaan keuangan BLUD untuk mendukung operasional dan pelayanan. 4. Penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan. 5. Integrasi program pengelolaan kawasan konservasi dengan RAPPP, khususnya Papua Produktif. 6. Monitoring dan evaluasi berkala melalui mekanisme SHEK BP3OKP.
<p>Dokumentasi</p>	



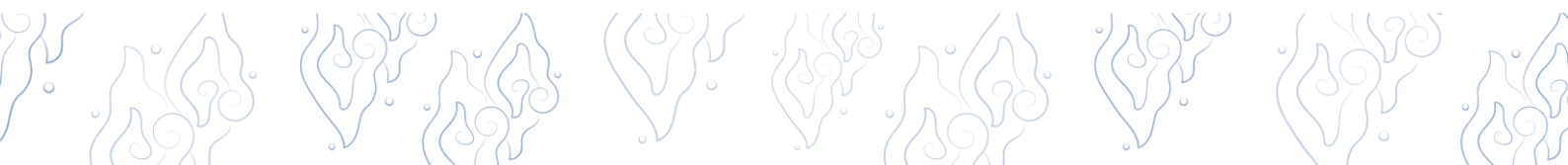
Kegiatan 4

Nama Kegiatan	Audiensi dengan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 11 Maret 2026, bertempat di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Latar Belakang	Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) merupakan wadah strategis bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Dalam konteks percepatan pembangunan Papua Barat Daya, penguatan peran pelaku usaha lokal menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan agenda Papua Produktif sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029.



	<p>Namun demikian, pelaku usaha OAP masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan akses permodalan, kapasitas manajerial, akses pasar, serta keterlibatan dalam rantai pasok pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara KAPP, pemerintah daerah, dan BP3OKP sebagai lembaga dengan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) guna memastikan keberpihakan kebijakan dan program terhadap pengusaha OAP.</p> <p>Audiensi ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk memperkuat koordinasi serta menyusun strategi kolaborasi dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua melalui KAPP.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi dan koordinasi antara BP3OKP dan KAPP Papua Barat Daya. 2. Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pengusaha OAP. 3. Mendorong penguatan peran KAPP dalam pembangunan ekonomi daerah. 4. Mensinkronkan program KAPP dengan kebijakan pembangunan (RAPPP – Papua Produktif). 5. Menyusun langkah strategis dukungan BP3OKP terhadap KAPP.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus KAPP Papua Barat Daya 2. BP3OKP Papua Barat Daya (Pokja Papua Produktif)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi dan koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil dan peran KAPP Papua Barat Daya, meliputi struktur organisasi, program kerja, serta kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi OAP. 2. Permasalahan dan tantangan pengusaha OAP, antara lain keterbatasan akses permodalan, kapasitas SDM

	<p>dan manajemen usaha, akses pasar dan kemitraan, serta keterlibatan dalam proyek pembangunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peran BP3OKP dalam mendukung KAPP (SHEK), melalui sinkronisasi program dengan RAPP, fasilitasi koordinasi lintas sektor, serta dukungan kebijakan dan advokasi. 4. Peluang kolaborasi, meliputi pengembangan program pemberdayaan ekonomi lokal, kemitraan dengan BUMN/BUMD dan sektor swasta, serta akses pembiayaan seperti KUR dan koperasi. 5. Strategi penguatan Papua Produktif, melalui pengembangan komoditas unggulan, pemberdayaan UMKM OAP, serta penguatan ekosistem ekonomi lokal.
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya komunikasi dan koordinasi awal antara BP3OKP dan KAPP Papua Barat Daya. 2. Teridentifikasinya permasalahan utama yang dihadapi oleh pengusaha OAP. 3. Tercapainya kesepahaman untuk memperkuat peran KAPP dalam pembangunan ekonomi daerah. 4. Terbukanya peluang kolaborasi antara KAPP, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait. 5. Adanya komitmen awal untuk menyusun program bersama dalam mendukung Papua Produktif.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kemitraan usaha antara pengusaha OAP dengan BUMN, BUMD, dan sektor swasta. 2. Integrasi program KAPP ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD). 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui mekanisme SHEK BP3OKP.



Dokumentasi



Kegiatan 5

Nama Kegiatan	Audiensi dan Penyampaian Proposal Pembentukan BUMD oleh Bapak Andreas Simon
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 11 Maret 2026, bertempat di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Latar Belakang	<p>Dalam rangka percepatan pembangunan di Tanah Papua melalui kebijakan Otonomi Khusus, diperlukan langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan produktivitas daerah, khususnya pada sektor energi dan industri berbasis sumber daya alam.</p> <p>Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan gas sebagai sumber energi yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu,</p>

	<p>terdapat peluang kepemilikan Participating Interest (PI) sebesar 10% bagi daerah yang hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, BP3OKP melalui misi Papua Produktif melaksanakan kegiatan evaluasi dan koordinasi guna membahas peluang, tantangan, serta langkah implementatif dalam optimalisasi sektor energi, termasuk penguatan kelembagaan daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus.</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi potensi pemanfaatan gas sebagai sumber energi daerah. 2. Mendorong peningkatan PAD melalui sektor energi dan industri turunan. 3. Mengkaji peluang pengambilan Participating Interest (PI) 10% oleh pemerintah daerah. 4. Menguatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan energi daerah. 5. Menyusun langkah strategis pengembangan industri berbasis energi di Papua Barat Daya, khususnya di kawasan ekonomi khusus.
<p>Peserta Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BP3OKP Papua Barat Daya (Drs. Otto Ihalauw, MA) 2. Anggota Pokja Papua Produktif BP3OKP Papua Barat Daya (Alberd Berhad Duwith, ST, MT) 3. Narasumber/Tenaga Ahli: Andreas Simon (berpengalaman di PT Hendrison Iriana periode 1992–2020)
<p>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</p>	Evaluasi dan koordinasi
<p>Misi/Keterangan</p>	Papua Produktif
<p>Poin-Poin Pembahasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan gas sebagai bahan bakar, meliputi potensi gas sebagai energi alternatif yang efisien dan

	<p>bernilai ekonomi tinggi, serta peluang pengembangan pembangkit listrik berbasis gas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Potensi peningkatan PAD daerah, melalui optimalisasi pengelolaan sektor energi dan pemanfaatan sumber daya lokal. 3. Participating Interest (PI) 10% untuk daerah, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Hak kepemilikan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal • Kebutuhan pembentukan BUMD khusus sebagai prasyarat pengelolaan PI • Kepemilikan saham BUMD yang harus 100% dimiliki oleh pemerintah daerah • Landasan regulasi, antara lain Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 dan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 4. Skema kerja sama ketenagalistrikan, termasuk peran Indonesia Power (anak perusahaan PLN), peluang keterlibatan swasta melalui skema Independent Power Producer (IPP), serta pembelajaran dari studi kasus PLTU Batang. 5. Pengembangan industri metalurgi, yang direncanakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, termasuk potensi investasi dari ANTAM dan penguatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasinya potensi besar pemanfaatan gas sebagai sumber energi strategis daerah. 2. Diperolehnya pemahaman bahwa Participating Interest (PI) 10% merupakan peluang nyata dalam meningkatkan PAD yang belum dimanfaatkan secara optimal. 3. Disepakatinya pentingnya pembentukan BUMD khusus sebagai prasyarat dalam pengelolaan PI.

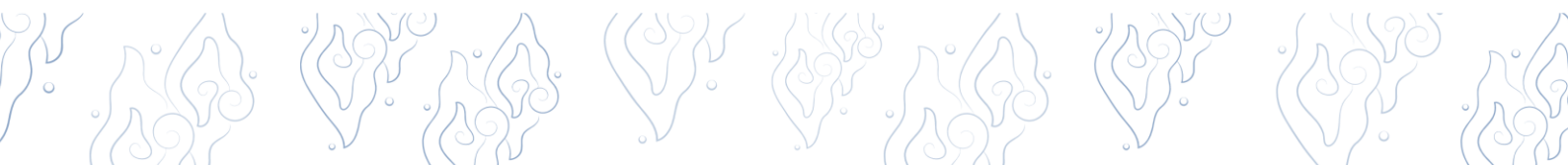
	<p>4. Terbukanya peluang kerja sama antara pemerintah daerah, PLN, dan pihak swasta dalam sektor ketenagalistrikan.</p> <p>5. Menguatnya arah pengembangan KEK Sorong sebagai pusat industri metalurgi di Papua Barat Daya.</p>
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	<p>1. Teridentifikasinya potensi besar pemanfaatan gas sebagai sumber energi strategis daerah.</p> <p>2. Diperolehnya pemahaman bahwa Participating Interest (PI) 10% merupakan peluang nyata dalam meningkatkan PAD yang belum dimanfaatkan secara optimal.</p> <p>3. Disepakatinya pentingnya pembentukan BUMD khusus sebagai prasyarat dalam pengelolaan PI.</p> <p>4. Terbukanya peluang kerja sama antara pemerintah daerah, PLN, dan pihak swasta dalam sektor ketenagalistrikan.</p> <p>5. Menguatnya arah pengembangan KEK Sorong sebagai pusat industri metalurgi di Papua Barat Daya.</p>
Dokumentasi	-

Kegiatan 6

Nama Kegiatan	Visitasi dan SHEK Misi Papua Produktif (MBG dan Ketahanan Pangan): Lokus SPPG Kaibus Yayasan Pelangi Maluku di Kabupaten Sorong Selatan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 17 Maret 2026, bertempat di SPPG Kaibus Yayasan Pelangi Maluku, Kabupaten Sorong Selatan
Latar Belakang	Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang menasar peserta didik serta kelompok B3 (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui) di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Sorong Selatan, khususnya Distrik Teminabuan, pelaksanaan

	<p>program MBG dilaksanakan melalui 3 (tiga) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).</p> <p>Ketiga SPPG tersebut melayani sekitar 6.380 peserta didik, di luar kelompok B3, dengan tujuan untuk menurunkan angka stunting, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan belanja pangan lokal.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, setiap SPPG wajib memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Oleh karena itu, BP3OKP melalui pendekatan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) melakukan visitasi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar serta memberikan dampak terhadap ketahanan pangan dan ekonomi daerah.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melihat kondisi inflasi di Kabupaten Sorong Selatan sebagai indikator ketahanan pangan. 2. Menilai pelaksanaan program MBG pada SPPG Kaibus Yayasan Pelangi Maluku di Kabupaten Sorong Selatan.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BP3OKP, terdiri dari: Anggota BP3OKP Pokja Papua Sehat Pokja Papua Produktif Pokja Papua Cerdas 2. Forkopimda Kabupaten Sorong Selatan 3. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Sorong Selatan
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Evaluasi dan koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada SPPG Kaibus di Distrik Teminabuan

	<p>berdasarkan standar SOP Badan Gizi Nasional (BGN).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengukuran capaian sasaran layanan kepada peserta didik dan kelompok B3 (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui). 3. Analisis dampak program terhadap penurunan stunting, inflasi daerah, peningkatan belanja pangan lokal, serta penyerapan tenaga kerja. 4. Identifikasi kendala dan risiko dalam pelaksanaan program. 5. Belum dimanfaatkannya bahan pangan lokal tertentu, seperti udang, dalam menu MBG. 6. Belum adanya mekanisme pengukuran “before-after” (sebelum dan sesudah) untuk menilai dampak program, khususnya terkait berat badan, tinggi badan, dan kehadiran siswa di sekolah.
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada SPPG Kaibus Distrik Teminabuan telah berjalan sesuai dengan standar SOP Badan Gizi Nasional. 2. Peserta didik dan kelompok B3 telah terlayani dengan baik sesuai sasaran program. 3. Kegiatan operasional SPPG melibatkan tenaga kerja lokal sebanyak 43 orang, yang mulai memberikan dampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan indikasi inflasi daerah. 4. Penyerapan bahan pangan lokal cukup baik, di mana selain dari Kabupaten Sorong Selatan, juga terdapat pasokan dari Kabupaten Maybrat yang diperoleh melalui Pasar Kajase (pasar rakyat) di Teminabuan. 5. Terdapat potensi risiko inflasi apabila pasokan bahan pangan dari Kabupaten Maybrat berkurang, khususnya jika SPPG di wilayah tersebut mulai

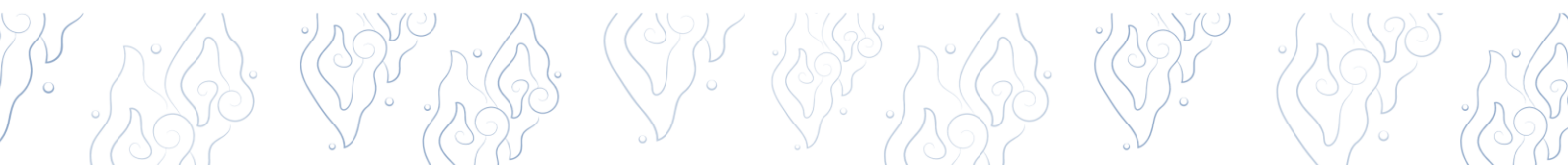


	<p>beroperasi dan menyerap hasil pertanian lokal secara langsung.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong Selatan bersama Satgas MBG perlu melakukan perhitungan kebutuhan bahan pangan (pertanian dan peternakan) secara komprehensif, guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan dari wilayah lain dan mencegah inflasi. 2. Dinas Kesehatan perlu melakukan kajian terkait potensi alergi pangan (misalnya udang) serta menyusun mekanisme pengukuran dampak program MBG melalui pendekatan “before-after”, khususnya pada indikator status gizi dan kehadiran siswa.
<p>Dokumentasi</p>	



Kegiatan 7

<p>Nama Kegiatan</p>	<p>Visitasi Lahan Ketahanan Pangan Batalyon/KNPI Yonif 807/MNM Sorong Selatan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan: Panen Kacang Panjang dan Semangka serta Penanaman Bibit Jagung dan Kacang</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p>	<p>Rabu, 18 Maret 2026, bertempat di Lahan Ketahanan Pangan Batalyon/KNPI Yonif 807/MNM, Kabupaten Sorong Selatan</p>
<p>Latar Belakang</p>	<p>Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas strategis dalam pembangunan daerah, khususnya di wilayah Papua Barat Daya, sebagai bagian dari agenda Papua Produktif dalam kerangka Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029. Penguatan sektor pertanian berbasis potensi lokal menjadi kunci dalam meningkatkan kemandirian pangan, kesejahteraan masyarakat, serta stabilitas sosial ekonomi.</p> <p>Batalyon/KNPI Yonif 807/MNM Sorong Selatan bersama Pemerintah Daerah telah menginisiasi pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian produktif sebagai bentuk</p>



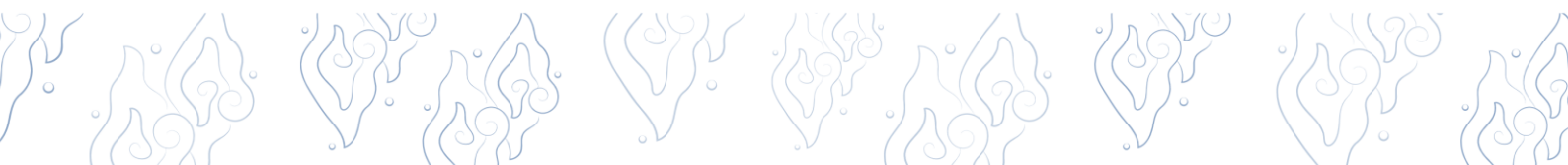
	<p>dukungan terhadap program ketahanan pangan. Kegiatan visitasi ini dilaksanakan untuk melihat secara langsung progres pemanfaatan lahan, hasil panen, serta mendorong keberlanjutan program melalui penanaman komoditas pangan.</p> <p>Kegiatan ini juga merupakan bagian dari peran BP3OKP dalam fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) guna memastikan integrasi program ketahanan pangan dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan lahan ketahanan pangan. 2. Mendukung pengembangan pertanian lokal sebagai bagian dari Papua Produktif. 3. Mendorong sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penguatan ketahanan pangan. 4. Mengidentifikasi potensi pengembangan komoditas pertanian lokal. 5. Mendorong keberlanjutan program pertanian berbasis lahan produktif.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batalyon/KNPI Yonif 807/MNM Sorong Selatan 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan (OPD terkait) 3. BP3OKP Papua Barat Daya (Pokja Papua Produktif)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progres pemanfaatan lahan ketahanan pangan, meliputi luasan lahan yang dimanfaatkan serta jenis komoditas yang dikembangkan. 2. Kegiatan panen dan penanaman, meliputi panen kacang panjang dan semangka serta penanaman

	<p>bibit jagung dan kacang sebagai bentuk keberlanjutan program.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Manfaat program bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan ketersediaan pangan dan dampak ekonomi lokal. 4. Permasalahan dan tantangan, antara lain terkait ketersediaan sarana produksi (bibit, pupuk, alat), akses pasar dan distribusi hasil panen, serta kebutuhan pendampingan teknis pertanian. 5. Penguatan program Papua Produktif, melalui pengembangan pertanian berbasis potensi lokal dan integrasi dengan program pemerintah daerah serta RAPPP
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan panen kacang panjang dan semangka sebagai hasil nyata program ketahanan pangan. 2. Dilaksanakannya penanaman bibit jagung dan kacang sebagai upaya keberlanjutan program. 3. Teridentifikasinya potensi pengembangan pertanian di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. 4. Terbangunnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penguatan ketahanan pangan. 5. Meningkatnya komitmen bersama dalam mendukung ketahanan pangan daerah.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendampingan teknis pertanian kepada kelompok tani. 2. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian (bibit, pupuk, dan alat pertanian). 3. Pengembangan akses pasar untuk hasil pertanian lokal. 4. Integrasi program ketahanan pangan ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD).

	<p>5. Replikasi model pemanfaatan lahan produktif di wilayah lain.</p> <p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui mekanisme SHEK BP3OKP.</p>
<p>Dokumentasi</p>	

Kegiatan 8

<p>Nama Kegiatan</p>	<p>Pertemuan bersama Dinas PTSP Kabupaten Sorong Selatan</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p>	<p>Kamis, 26 Maret 2026, bertempat di Sekretariat BPP Papua Barat Daya</p>
<p>Latar Belakang</p>	<p>Pengelolaan perizinan yang efektif, transparan, dan terintegrasi merupakan salah satu kunci dalam mendorong iklim investasi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kabupaten Sorong Selatan, optimalisasi layanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>



	<p>(PTSP) menjadi sangat strategis dalam menarik investasi, memperkuat ekonomi daerah, serta meningkatkan kemandirian fiskal.</p> <p>Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan perizinan, antara lain keterbatasan sistem pelayanan, rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi investasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergi antara Dinas PTSP, pemerintah daerah, dan BP3OKP dalam rangka memperkuat tata kelola perizinan yang mendukung peningkatan PAD.</p> <p>BP3OKP melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) berperan dalam memastikan kebijakan perizinan dan investasi selaras dengan arah pembangunan daerah dan nasional, khususnya dalam mendukung agenda Papua Produktif.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 6. Membangun koordinasi antara BP3OKP dan Dinas PTSP Kabupaten Sorong Selatan. 7. Mengidentifikasi kondisi dan permasalahan dalam pengelolaan perizinan. 8. Mendorong optimalisasi perizinan sebagai sumber peningkatan PAD. 9. Mensinkronkan kebijakan perizinan dengan program pembangunan daerah. 10. Menyusun langkah strategis peningkatan investasi daerah.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dinas PTSP Kabupaten Sorong Selatan 5. BP3OKP Papua Barat Daya (Pokja Papua Produktif)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi dan koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	1. Pengelolaan perizinan di Kabupaten Sorong Selatan, yang saat ini dilaksanakan melalui

	<p>kombinasi sistem Online Single Submission (OSS), layanan online daerah, serta mekanisme manual (offline), dengan dominasi perizinan pada sektor perdagangan, jasa, dan usaha berbasis sumber daya alam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kontribusi perizinan terhadap PAD, yang bersumber dari retribusi perizinan dan aktivitas usaha terdaftar, namun masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan melalui optimalisasi kepatuhan pelaku usaha dan perluasan basis pajak daerah. 3. Permasalahan dan tantangan, antara lain rendahnya kepatuhan perizinan, keterbatasan sistem pelayanan dan kapasitas SDM, serta belum optimalnya koordinasi antar OPD. 4. Strategi peningkatan investasi daerah, melalui penyederhanaan perizinan, promosi potensi unggulan daerah, serta pemberian kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. 5. Peran BP3OKP melalui fungsi SHEK, dalam memfasilitasi sinkronisasi kebijakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta melakukan monitoring dan evaluasi guna mendorong tata kelola perizinan yang lebih efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Teridentifikasinya kondisi dan tantangan dalam pengelolaan perizinan di Kabupaten Sorong Selatan. 7. Terpetakannya potensi peningkatan PAD melalui optimalisasi sistem perizinan. 8. Meningkatnya pemahaman bersama mengenai pentingnya tata kelola perizinan yang efektif. 9. Terbangunnya koordinasi antara Dinas PTSP, BP3OKP, dan OPD terkait.

	<p>10. Adanya komitmen untuk mendorong perbaikan sistem perizinan dan peningkatan investasi daerah.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<p>7. Penguatan sistem pelayanan perizinan berbasis digital (OSS) guna meningkatkan kemudahan dan transparansi.</p> <p>8. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui sosialisasi dan pengawasan.</p> <p>9. Penyusunan peta potensi investasi daerah sebagai dasar promosi investasi.</p> <p>10. Penguatan koordinasi antar OPD dalam pengelolaan perizinan dan peningkatan PAD.</p> <p>11. Integrasi kebijakan perizinan dengan program Papua Produktif dalam kerangka RAPPP.</p> <p>12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui mekanisme SHEK BP3OKP.</p>
<p>Dokumentasi</p>	

3.4 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Polhukam (Damai)

Kegiatan 1

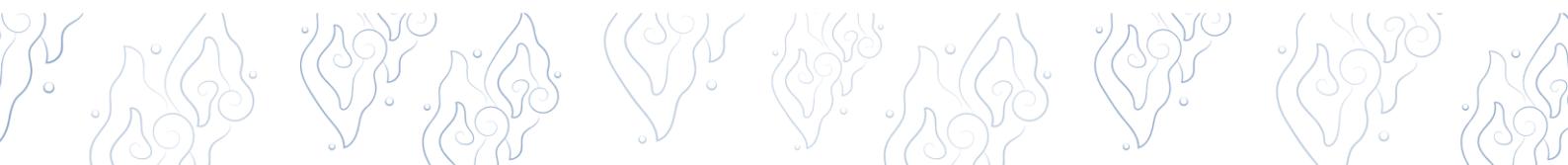
Nama Kegiatan	Masa Sidang I Majelis Rakyat Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 5 Maret 2026, bertempat di Rylich Panorama Hotel Sorong
Latar Belakang	<p>Kegiatan ini dilaksanakan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya sebagai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dalam rangka menjangirng dan menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).</p> <p>Penjangirngan aspirasi dilakukan melalui kegiatan monitoring lapangan di 6 (enam) kabupaten/kota pada bulan Juli dan Desember 2025, dengan melibatkan Pokja Adat, Agama, dan Perempuan. Hasil penjangirngan tersebut kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun aspirasi masyarakat adat, perempuan, dan umat beragama. 2. Menjamin perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP). 3. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah. 4. Mendorong pembangunan yang berpihak pada OAP.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Gubernur Papua Barat Daya 2. Penjabat Sekretaris Daerah 3. Pimpinan dan seluruh anggota MRP Papua Barat Daya 4. Pimpinan dan kelompok khusus DPRP Papua Barat Daya 5. Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat Daya

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Organisasi kepemudaan 7. Tokoh masyarakat (adat, agama, dan perempuan) 8. BP3OKP Papua Barat Daya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Damai (Polhukam)
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosial Budaya, meliputi perlindungan adat, pemetaan wilayah adat, serta penguatan kelembagaan adat. 2. Pemerintahan dan Politik, mencakup prioritas OAP dalam jabatan publik (ASN, TNI/Polri) serta penyelesaian batas wilayah. 3. Hukum, meliputi penyusunan Perda/Perdatus terkait perlindungan OAP, pengendalian minuman keras, dan aspek hukum lainnya. 4. Pendidikan, meliputi pendidikan gratis, pemberian beasiswa, pengembangan sekolah berasrama, serta peningkatan kualitas SDM. 5. Kesehatan, mencakup penambahan tenaga medis, peningkatan fasilitas kesehatan, serta layanan ibu dan anak. 6. Ekonomi, meliputi pemberdayaan ekonomi OAP serta isu investasi, termasuk penolakan perkebunan sawit di wilayah tertentu. 7. Infrastruktur dan Transportasi, mencakup pembangunan jalan, penyediaan rumah layak huni, transportasi, serta pengendalian banjir. 8. Agama, meliputi dukungan pendanaan kegiatan keagamaan, insentif tokoh agama, serta penguatan kerukunan umat beragama. 9. Perempuan dan Anak, mencakup perlindungan dari kekerasan, rehabilitasi korban, serta pemberdayaan perempuan.

Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya pokok-pokok rekomendasi aspirasi masyarakat di tingkat provinsi dan 6 (enam) kabupaten/kota. 2. Teridentifikasinya berbagai isu strategis, antara lain: 3. a. Perlindungan hak ulayat dan adat 4. b. Ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan 5. c. Keterbatasan ekonomi masyarakat OAP 6. d. Permasalahan sosial seperti minuman keras, narkoba, dan kekerasan 7. Menguatnya tuntutan agar pembangunan daerah lebih berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP).
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti rekomendasi dalam bentuk program dan penganggaran. 2. Penyusunan dan penguatan Peraturan Daerah/Perdatus yang berpihak pada OAP. 3. Peningkatan keterlibatan MRP dalam kebijakan strategis, terutama terkait investasi dan pendataan OAP. 4. Prioritas program pada: 5. Pendidikan gratis dan beasiswa 6. Layanan kesehatan dasar 7. Pemberdayaan ekonomi lokal 8. Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD/DPRK, MRP, dan aparat keamanan. 9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap implementasi rekomendasi.
Dokumentasi	-

Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Pertemuan dengan Tokoh Agama
----------------------	------------------------------



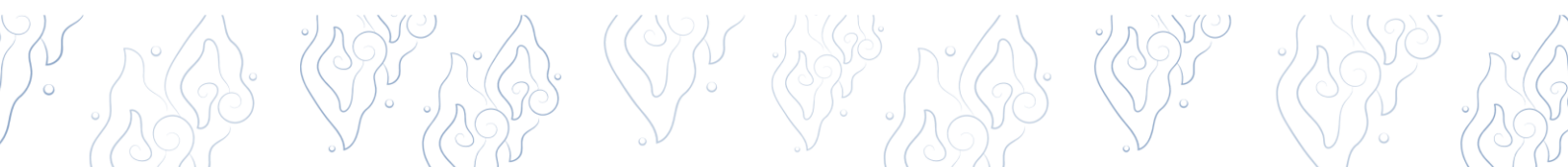
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 10 Maret 2026 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Latar Belakang	<p>Tokoh agama memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Di wilayah Papua Barat Daya, peran tokoh agama sangat penting dalam mendukung terciptanya situasi yang kondusif, harmonis, dan damai sebagai prasyarat utama percepatan pembangunan.</p> <p>Selain itu, berbagai kegiatan keagamaan dan sosial yang dilakukan oleh lembaga keagamaan seringkali membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk fasilitasi maupun bantuan program. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara tokoh agama dan BP3OKP sebagai bagian dari fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK).</p> <p>Pertemuan ini dilaksanakan sebagai wadah dialog untuk memperkuat sinergi, menyerap aspirasi tokoh agama, serta mendukung pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka Papua Damai.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi dan koordinasi antara BP3OKP dan tokoh agama. 2. Menyerap aspirasi dan kebutuhan lembaga keagamaan. 3. Mendorong peran tokoh agama dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan umat. 4. Mengidentifikasi kebutuhan dukungan program keagamaan dari pemerintah daerah. 5. Mendukung terciptanya Papua Damai sebagai bagian dari percepatan pembangunan.

Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tokoh agama dari berbagai denominasi di Papua Barat Daya 2. BP3OKP Papua Barat Daya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, koordinasi, dan harmonisasi
Misi/Keterangan	Papua Polhukam/Damai
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian aspirasi dan kebutuhan lembaga keagamaan di Papua Barat Daya. 2. Dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. 3. Mekanisme pengajuan proposal bantuan kepada pemerintah daerah. 4. Peran BP3OKP dalam mendukung dan mengawal aspirasi tokoh agama.
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya komunikasi dan hubungan yang baik antara BP3OKP dan tokoh agama. 2. Teridentifikasinya kebutuhan dukungan program keagamaan dan sosial. 3. Meningkatnya pemahaman terkait mekanisme pengajuan bantuan kepada pemerintah daerah. 4. Adanya harapan dukungan BP3OKP dalam mengawal aspirasi tokoh agama.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. BP3OKP akan mengawal aspirasi dari tokoh agama kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Gubernur). 2. Penguatan koordinasi antara tokoh agama dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program keagamaan dan sosial. 3. Integrasi program keagamaan yang mendukung stabilitas sosial dalam perencanaan daerah.

	4. Monitoring dan evaluasi dukungan program melalui mekanisme SHEK BP3OKP.
Dokumentasi	

Kegiatan 3

Nama Kegiatan	Silaturahmi dan Buka Bersama Unimuda Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 10 Maret 2026 di Gedung Rumah Sakit Unimuda Sorong
Latar Belakang	<p>Silaturahmi merupakan salah satu sarana penting dalam memperkuat hubungan kelembagaan, membangun komunikasi, serta meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan. Dalam konteks percepatan pembangunan Papua Barat Daya, kemitraan dengan perguruan tinggi seperti UNIMUDA Sorong menjadi strategis, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, serta dukungan terhadap sektor kesehatan.</p> <p>Kegiatan buka bersama ini tidak hanya menjadi ajang kebersamaan dalam momentum bulan Ramadan, tetapi juga menjadi ruang informal untuk memperkuat</p>



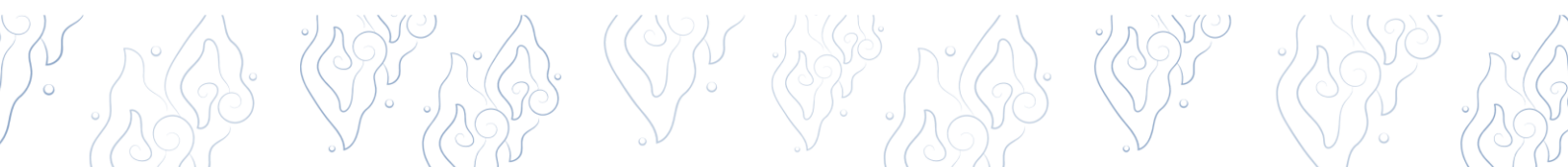
	koordinasi dan membangun kesepahaman terkait program pembangunan, termasuk pengembangan Rumah Sakit UNIMUDA serta kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung misi Papua Cerdas dan Papua Produktif.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempererat hubungan dan komunikasi antara BP3OKP dan UNIMUDA Sorong. 2. Membangun sinergi dalam mendukung program pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan. 3. Mendukung pengembangan SDM, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). 4. Menjadi ruang diskusi informal terkait program dan kolaborasi ke depan. 5. Mendorong peran perguruan tinggi dalam mendukung RAPPP (Papua Cerdas dan Papua Produktif).
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan dan civitas akademika UNIMUDA Sorong 2. BP3OKP Papua Barat Daya 3. Undangan/stakeholder terkait
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dan sinkronisasi
Misi/Keterangan	Papua Damai
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kemitraan antara BP3OKP dan UNIMUDA dalam mendukung pembangunan daerah. 2. Peran UNIMUDA dalam pengembangan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM, khususnya OAP. 3. Dukungan terhadap pengembangan dan fungsionalisasi Rumah Sakit UNIMUDA Sorong. 4. Peluang kolaborasi program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

	<p>5. Pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung implementasi RAPPP</p>
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjalannya hubungan yang lebih erat antara BP3OKP dan UNIMUDA Sorong. 2. Meningkatnya komitmen bersama dalam mendukung pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. 3. Terbukanya peluang kerja sama dalam pengembangan SDM dan layanan kesehatan. 4. Meningkatnya pemahaman bersama terkait peran perguruan tinggi dalam percepatan pembangunan Papua Barat Daya.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan koordinasi dan komunikasi antara BP3OKP dan UNIMUDA dalam program prioritas. 2. Penjajakan kerja sama lebih lanjut dalam pengembangan SDM dan layanan kesehatan. 3. Dukungan terhadap percepatan fungsionalisasi Rumah Sakit UNIMUDA Sorong. 4. Integrasi program UNIMUDA dengan kebijakan pembangunan daerah (RAPPP). 5. Monitoring dan evaluasi kolaborasi melalui mekanisme SHEK BP3OKP.
<p>Dokumentasi</p>	 <p>The image shows a group of approximately ten men sitting on a dark-colored sofa in a meeting room. They are dressed in a mix of formal and semi-formal attire, including shirts, jackets, and traditional Indonesian clothing. In front of them is a low coffee table with several bottles of water and some food items. In the background, a large screen displays a presentation slide with text and logos, including the BP3OKP logo. The room has light-colored walls and a door is visible on the right side.</p>



Kegiatan 4

Nama Kegiatan	SHEK bersama Kepala BPKAD Papua Barat Daya dan Komandan Resor Militer (Danrem) PVT 181
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 12 Maret 2026 di Korem 181/PVT Sorong
Latar Belakang	Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat Daya, diperlukan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta lembaga pengarah pembangunan. Koordinasi ini menjadi penting terutama dalam memastikan kesiapan pelaksanaan program prioritas, serta dukungan keamanan terhadap kegiatan pembangunan di lapangan.

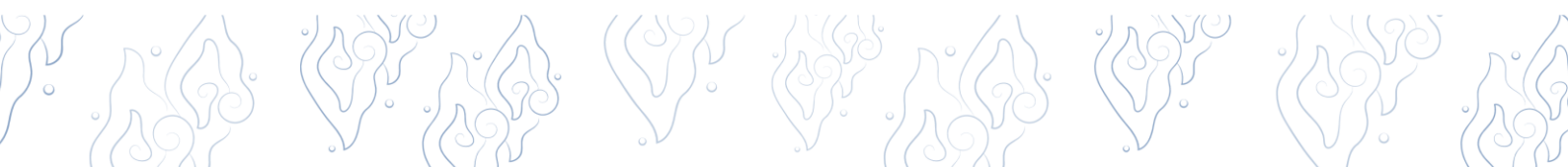


	<p>TNI melalui Korem 181/PVT memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pelaksanaan kegiatan strategis di wilayah.</p> <p>BP3OKP melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) telah memfasilitasi pertemuan ini.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi lintas sektor antara BP3OKP, BPKAD, dan Korem 181/PVT. 2. Menguatkan koordinasi dalam mendukung kegiatan strategis pemerintah daerah. 3. Mendukung kelancaran pelaksanaan rencana kunjungan kerja Gubernur Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPKAD Papua Barat Daya 2. Komandan Resor Militer (Danrem) 181/PVT 3. BP3OKP Papua Barat Daya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Damai
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pengamanan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan strategis pemerintah daerah. 2. Persiapan kunjungan lapangan Gubernur Papua Barat Daya di beberapa titik wilayah. 3. Peran masing-masing pihak dalam mendukung percepatan pembangunan. 4. Penguatan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program prioritas daerah.
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya koordinasi antara BP3OKP, BPKAD, dan Korem 181/PVT. 2. Teridentifikasinya kebutuhan dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan program.

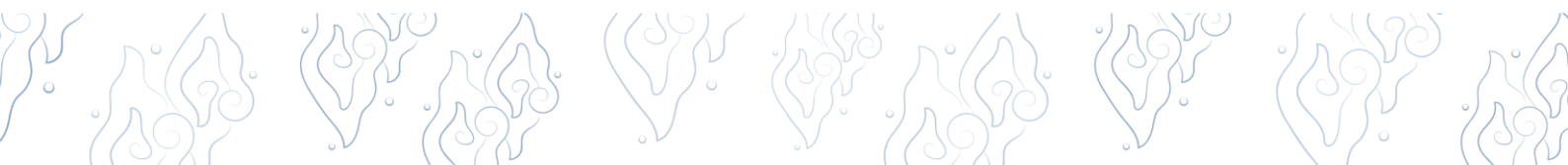
	3. Meningkatnya kesiapan dalam mendukung kunjungan lapangan Gubernur di beberapa lokasi.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi lanjutan terkait persiapan dan pelaksanaan kunjungan lapangan Gubernur di beberapa titik wilayah. 2. Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BP3OKP, dan aparat keamanan dalam pelaksanaan program strategis. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme SHEK BP3OKP.
Dokumentasi	

Kegiatan 5

Nama Kegiatan	Visitasi & SHEK Misi Papua Polhukam (Damai) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan: Lokus Polres Sorong Selatan (Kapolres)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 17 Maret 2026, bertempat di Polres Sorong Selatan
Latar Belakang	Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat utama dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat



	<p>Daya. Kabupaten Sorong Selatan sebagai salah satu wilayah strategis masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek keamanan, sosial, maupun pelayanan dasar masyarakat.</p> <p>Kepolisian Resor (Polres) Sorong Selatan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pendekatan humanis. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan BP3OKP dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.</p> <p>Kegiatan visitasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) untuk melihat kondisi keamanan di lapangan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendukung implementasi misi Papua Polhukam (Papua Damai) dalam kerangka RAPPP 2025–2029.</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi antara BP3OKP, Polres Sorong Selatan, dan Pemerintah Daerah. 2. Mengidentifikasi kondisi dan tantangan keamanan di wilayah Sorong Selatan. 3. Mendorong sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. 4. Mendukung pelaksanaan program Papua Damai berbasis pendekatan sosial dan humanis. 5. Memastikan keamanan sebagai faktor pendukung percepatan pembangunan daerah.
<p>Peserta Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapolres Sorong Selatan beserta jajaran 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan 3. BP3OKP Papua Barat Daya



Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi, dan evaluasi
Misi/Keterangan	Papua Damai
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi dan situasi keamanan di Kabupaten Sorong Selatan. 2. Tantangan dan potensi gangguan keamanan serta penanganannya. 3. Peran Polres dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. 4. Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan BP3OKP. 5. Pendekatan humanis dan sosial dalam mendukung Papua Damai.
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya koordinasi yang baik antara BP3OKP, Polres, dan Pemerintah Daerah. 2. Teridentifikasinya kondisi dan tantangan keamanan di wilayah Sorong Selatan. 3. Meningkatnya komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan. 4. Terbukanya ruang sinergi dalam mendukung implementasi Papua Damai.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan BP3OKP dalam menjaga stabilitas wilayah. 2. Mendorong pendekatan terpadu (keamanan, sosial, dan pembangunan) dalam penanganan potensi konflik. 3. Peningkatan peran masyarakat dan tokoh lokal dalam menjaga keamanan lingkungan.

	4. Monitoring dan evaluasi secara berkala melalui mekanisme SHEK BP3OKP dalam mendukung Papua Damai.
Dokumentasi	

Kegiatan 6

Nama Kegiatan	Silaturahmi Idul Fitri 2026 bersama Ikaswara
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Sabtu, 21 Maret 2026 di Sekretariat Ikaswara, Kota Sorong
Latar Belakang	<p>Momentum Idul Fitri merupakan waktu yang tepat untuk mempererat silaturahmi, memperkuat persaudaraan, serta membangun kebersamaan antar elemen masyarakat. Di Papua Barat Daya, keberagaman suku, budaya, dan latar belakang sosial menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan dan stabilitas sosial.</p> <p>Ikatan Keluarga Sulawesi Selatan (IKASWARA) sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam menjaga hubungan sosial, mendukung kegiatan kemasyarakatan, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah.</p> <p>BP3OKP melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) perlu menjalin komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat,</p>

	termasuk organisasi paguyuban, guna memperkuat kohesi sosial dan mendukung terciptanya Papua Damai sebagai bagian dari percepatan pembangunan.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempererat hubungan silaturahmi antara BP3OKP dan IKASWARA. 2. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan. 3. Mendorong peran paguyuban dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan. 4. Mendukung terciptanya Papua Damai melalui pendekatan sosial dan budaya.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus dan anggota IKASWARA Kota Sorong 2. BP3OKP Papua Barat Daya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dan harmonisasi
Misi/Keterangan	Papua Polhukam/Damai
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran organisasi paguyuban dalam menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat. 2. Penguatan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi antar kelompok masyarakat. 3. Dukungan terhadap stabilitas sosial dalam mendukung pembangunan daerah. 4. Peran BP3OKP dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjalinnnya hubungan silaturahmi yang baik antara BP3OKP dan IKASWARA. 2. Meningkatnya komunikasi dan pemahaman bersama dalam menjaga stabilitas sosial. 3. Terbangunnya komitmen bersama untuk mendukung Papua Damai.

**Rekomendasi/Rencana
Tindak Lanjut**

1. Penguatan komunikasi dan koordinasi antara BP3OKP dan organisasi kemasyarakatan.
2. Pelibatan paguyuban dalam kegiatan sosial dan pembangunan daerah.
3. Monitoring dan evaluasi peran masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial melalui mekanisme SHEK BP3OKP.

Dokumentasi

Kegiatan 7

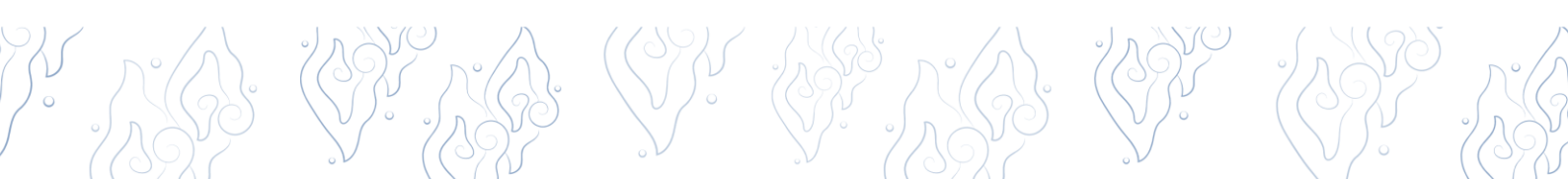
Nama Kegiatan	Pertemuan bersama Tokoh Masyarakat Adat Kabupaten Maybrat (Bapak Zakeus Momau)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 30 Maret 2026, bertempat di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Latar Belakang	<p>Konflik yang terjadi di Kampung Sori, Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat merupakan bagian dari dinamika keamanan yang berdampak terhadap stabilitas sosial, aktivitas ekonomi, serta keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan rasa ketidakamanan, tetapi juga berpotensi menghambat percepatan pembangunan di wilayah.</p> <p>Dalam konteks Papua, penyelesaian konflik tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi perlu mengedepankan pendekatan sosial, budaya, dan kearifan lokal melalui peran tokoh adat. Tokoh masyarakat adat memiliki posisi strategis dalam membangun rekonsiliasi, menjaga harmoni sosial, serta menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.</p> <p>BP3OKP sebagai lembaga dengan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) berperan dalam memfasilitasi dialog dan koordinasi lintas pihak guna mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda Papua Damai dalam RAPPP.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi dan dialog dengan tokoh masyarakat adat terkait konflik di Kampung Sori. 2. Mengidentifikasi akar permasalahan dan dinamika konflik yang terjadi.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mendorong peran tokoh adat dalam proses rekonsiliasi dan penyelesaian konflik. 4. Menyusun langkah strategis penanganan konflik berbasis pendekatan sosial budaya. 5. Mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan sosial masyarakat.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tokoh Masyarakat Adat Kabupaten Maybrat (Bapak Zakeus Momau) 2. BP3OKP Papua Barat Daya 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat (OPD terkait)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Damai (Polhukam)
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi dan kronologi konflik di Kampung Sori, meliputi latar belakang konflik serta dampaknya terhadap masyarakat. 2. Peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik, termasuk mekanisme rekonsiliasi berbasis adat serta pendekatan kearifan lokal. 3. Permasalahan dan tantangan, antara lain tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kondisi keamanan wilayah, serta keterbatasan akses dan komunikasi. 4. Strategi penanganan konflik, melalui dialog dan mediasi antar pihak, penguatan peran tokoh adat dan gereja, serta pendekatan sosial dan kemanusiaan. 5. Peran BP3OKP (SHEK), dalam memfasilitasi koordinasi lintas sektor serta sinkronisasi program pemulihan wilayah terdampak konflik.

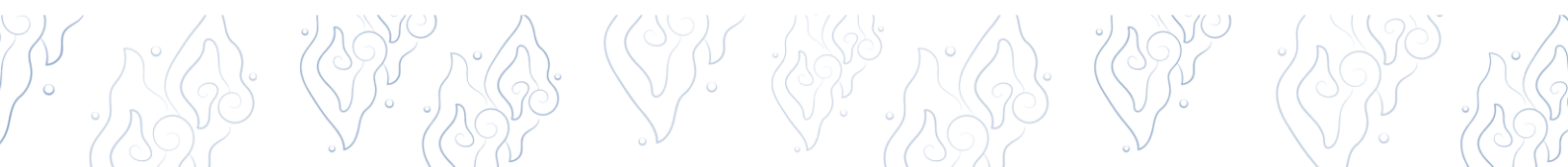
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya komunikasi yang konstruktif antara BP3OKP dan tokoh masyarakat adat. 2. Teridentifikasinya akar permasalahan dan dinamika konflik di Kampung Sori. 3. Adanya komitmen tokoh adat untuk berperan aktif dalam proses rekonsiliasi. 4. Terbukanya ruang dialog untuk penyelesaian konflik secara damai. 5. Meningkatnya koordinasi antara pemerintah, tokoh adat, dan pihak terkait.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dialog lanjutan (rekonsiliasi adat) yang melibatkan seluruh pihak terkait. 2. Penguatan peran tokoh adat dan tokoh agama dalam menjaga stabilitas sosial. 3. Penerapan pendekatan terpadu (keamanan, sosial, dan ekonomi) dalam penanganan konflik. 4. Pemulihan layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, di wilayah terdampak konflik. 5. Pelaksanaan program pemulihan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari Papua Produktif. 6. Monitoring dan evaluasi secara berkala melalui mekanisme SHEK BP3OKP.
Dokumentasi	-

Kegiatan 8


Nama Kegiatan	SHEK Misi Papua Polhukam (Damai) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat: Penanganan Kasus KKB di Kabupaten Maybrat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin dan Selasa, 30–31 Maret 2026, bertempat di Sekretariat BPP Papua Barat Daya

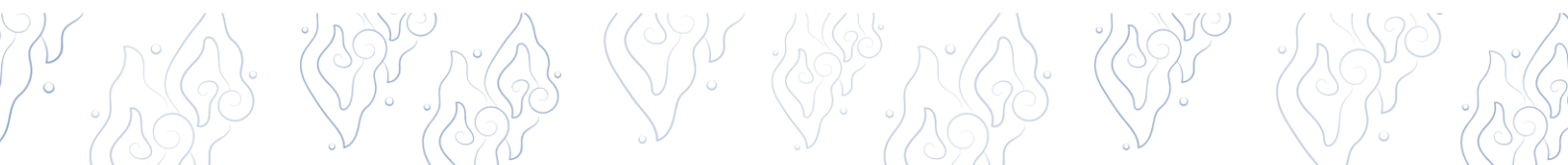


<p>Latar Belakang</p>	<p>Situasi keamanan di Kabupaten Maybrat, khususnya akibat aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), masih menjadi tantangan serius yang berdampak terhadap stabilitas sosial, pelayanan dasar, serta percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Insiden konflik dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat, terjadinya pengungsian, serta terhambatnya layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.</p> <p>Penanganan konflik di Papua, termasuk di Kabupaten Maybrat, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, tidak hanya melalui aspek keamanan, tetapi juga melalui pendekatan sosial, budaya, ekonomi, dan pembangunan wilayah. Hal ini sejalan dengan misi Papua Polhukam (Papua Damai) dalam kerangka RAPPP 2025–2029.</p> <p>BP3OKP sebagai lembaga dengan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) memiliki peran strategis dalam memfasilitasi koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanganan konflik dan pemulihan wilayah secara berkelanjutan.</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong koordinasi lintas sektor dalam penanganan konflik di Kabupaten Maybrat. 2. Mengidentifikasi kondisi terkini serta dampak konflik terhadap masyarakat. 3. Menyusun strategi penanganan konflik yang terintegrasi. 4. Mendorong pendekatan Papua Damai berbasis sosial dan budaya. 5. Mendukung pemulihan wilayah pasca konflik.



Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BP3OKP Papua Barat Daya 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat (Bupati dan OPD terkait) 3. Tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Damai (Polhukam)
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi dan perkembangan situasi keamanan, meliputi kronologi kejadian konflik/KKB, wilayah terdampak, serta jumlah masyarakat yang mengungsi. 2. Dampak konflik terhadap masyarakat, antara lain gangguan layanan pendidikan dan kesehatan, penurunan aktivitas ekonomi, serta kondisi sosial dan psikologis masyarakat. 3. Pendekatan penanganan konflik, meliputi: 4. Pendekatan keamanan oleh TNI/Polri 5. Pendekatan sosial dan budaya melalui peran tokoh adat dan agama 6. Pendekatan kemanusiaan melalui bantuan sosial dan layanan kesehatan 7. Peran BP3OKP (SHEK), dalam memfasilitasi koordinasi lintas sektor, sinkronisasi program pemulihan wilayah, serta monitoring dan evaluasi penanganan konflik. 8. Strategi Papua Damai (Polhukam), melalui upaya rekonsiliasi dan dialog, penguatan ketahanan sosial masyarakat, serta pencegahan konflik berulang.
Hasil Kegiatan	1. Terbangunnya koordinasi antara BP3OKP, pemerintah daerah, dan aparat keamanan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Teridentifikasinya kondisi aktual serta dampak konflik di Kabupaten Maybrat. 3. Tercapainya kesepakatan untuk menggunakan pendekatan terpadu dalam penanganan konflik. 4. Terbukanya ruang dialog dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat. 5. Meningkatnya komitmen bersama untuk mendorong Papua Damai di wilayah Maybrat.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dialog dan rekonsiliasi berbasis adat dalam penyelesaian konflik. 2. Penguatan pendekatan terpadu (keamanan, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan) dalam penanganan konflik. 3. Pemulihan layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, di wilayah terdampak. 4. Pelaksanaan program pemulihan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari Papua Produktif. 5. Penguatan peran tokoh adat dan tokoh agama dalam menjaga stabilitas sosial. 6. Monitoring dan evaluasi secara berkala melalui mekanisme SHEK BP3OKP.
<p>Dokumentasi</p>	

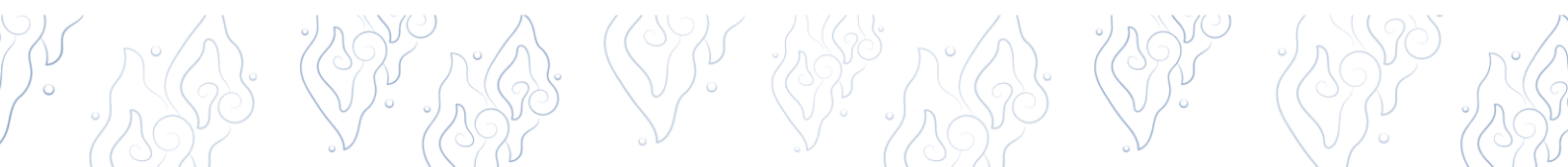




3.5 Pelaksanaan SHEK Strategis (Gabungan Misi)

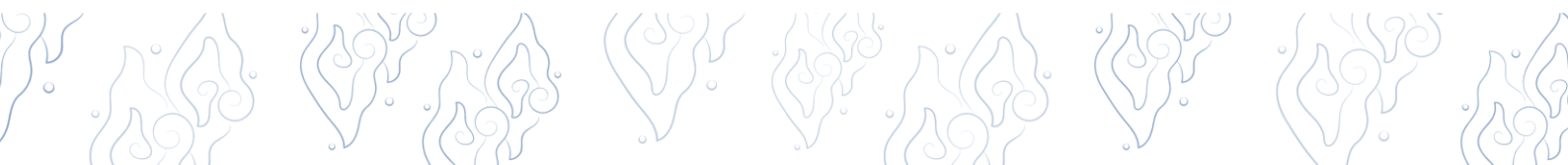
Kegiatan 1

Nama Kegiatan	SHEK dan Pendampingan kepada DPR Otsus Kota Sorong: Kegiatan Masa Reses I Pimpinan dan Anggota DPR Kota Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 3 Maret 2026, bertempat di Kota Sorong (Kelurahan Maladumes/Dapil setempat)
Latar Belakang	Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penguatan kelembagaan di lingkungan BPP Papua Barat Daya, serta berdasarkan undangan DPR Otsus Kota Sorong, anggota Pokja BPP melaksanakan pendampingan dalam kegiatan masa reses anggota DPR jalur pengangkatan (Otsus).

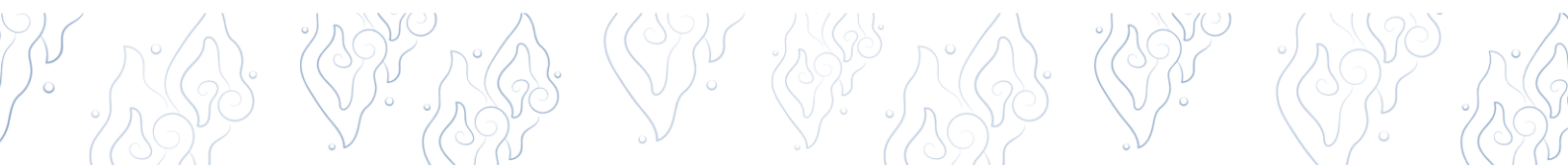



	<p>DPR pengangkatan merupakan kebijakan negara dalam rangka memberikan ruang bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk terlibat dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di daerah. Dalam pelaksanaannya, DPR Otsus Kota Sorong telah melakukan kunjungan kerja ke BPP dan menindaklanjutinya dengan permohonan pendampingan pada kegiatan reses di daerah pemilihan. Kegiatan masa reses merupakan bagian dari fungsi representasi DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat serta memastikan implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua berjalan optimal. Dalam konteks ini, BP3OKP sebagai lembaga dengan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) memiliki peran strategis dalam memastikan keselarasan antara aspirasi masyarakat, kebijakan daerah, serta arah pembangunan nasional (RIPPP dan RAPPP).</p> <p>Pendampingan ini juga bertujuan untuk memperkuat peran DPR Otsus dalam pengawasan pelaksanaan dana Otsus, peningkatan layanan dasar, serta percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong sebagai pusat pertumbuhan regional.</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi dalam pelaksanaan Otonomi Khusus. 2. Mendampingi DPR Otsus dalam pelaksanaan masa reses sebagai bagian dari fungsi representasi. 3. Mengintegrasikan hasil reses ke dalam kerangka kebijakan pembangunan berbasis Otsus. 4. Memastikan keselarasan antara aspirasi masyarakat dengan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RIPPP, RAPPP). 5. Mengidentifikasi isu strategis dan kebutuhan prioritas masyarakat Kota Sorong.

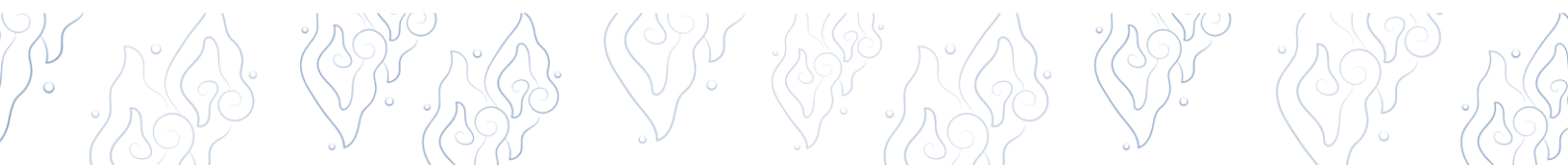
	6. Memperkuat peran BP3OKP dalam fungsi SHEK di wilayah Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Distrik Suprau 2. Anggota Pokja Sehat, Cerdas, dan Produktif BP3OKP 3. Wakil Ketua III DPR Kota Sorong (jalur Otsus) 4. Anggota DPR Kota Sorong jalur Otsus 5. Kepala Distrik Maladumes 6. Lurah Suprauw 7. Tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama 8. Perwakilan perempuan dan pemuda 9. Masyarakat setempat di lokasi reses
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Damai (Polhukam), serta penguatan kelembagaan DPR Otsus
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan anggota DPR Otsus serta tugas dan fungsi DPR jalur pengangkatan. 2. Tata kerja dan kewenangan DPR dalam pembangunan berbasis Otonomi Khusus. 3. Alur pelaksanaan Otonomi Khusus, termasuk mekanisme tagging Otsus. 4. Pola kerja lintas kelembagaan antara DPR Otsus dan BP3OKP. 5. Pemaparan tugas dan fungsi BP3OKP serta peran masing-masing Pokja (Sehat, Cerdas, Produktif, dan Damai). 6. Pelaksanaan pendampingan masa reses di Kelurahan Suprauw. 7. Penguatan peran DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat.

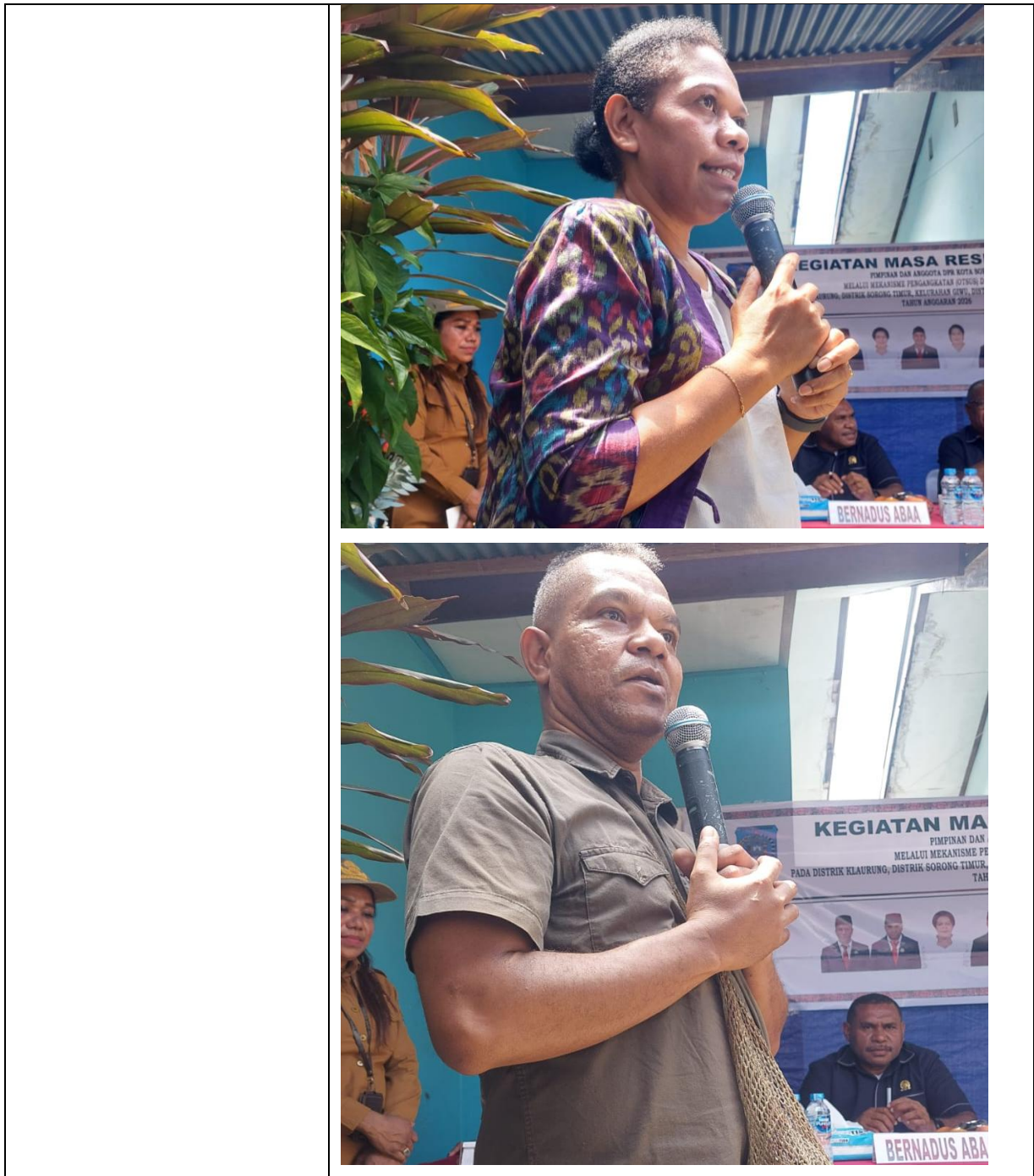


	<ol style="list-style-type: none"> 8. Integrasi hasil reses ke dalam kebijakan pembangunan daerah berbasis Otsus. 9. Keselarasan aspirasi masyarakat dengan dokumen perencanaan pembangunan. 10. Identifikasi isu strategis dan kebutuhan prioritas masyarakat Kota Sorong.
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. 2. Terbangunnya kolaborasi antara DPR Otsus dan BP3OKP Papua Barat Daya. 3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait alur Otonomi Khusus dan hasil pembangunan. 4. Teridentifikasinya berbagai isu strategis, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa afirmasi (ADEM, ADIK, kedinasan) serta kendala dalam distribusi kuot • Bantuan studi bagi OAP • Ketersediaan dan kualitas fasilitas sekola • Kesejahteraan guru • Kebutuhan transportasi pendidikan (bus sekolah/akses transportasi terjangkau) 5. Teridentifikasinya isu prioritas terkait layanan dasar dan ekonomi masyarakat. 6. Meningkatnya pemahaman DPR Otsus terhadap peran strategis dalam pengawasan pelaksanaan Otsus. 7. Terbangunnya sinergi antara DPR, BP3OKP, dan pemerintah daerah. 8. Adanya komitmen untuk mengintegrasikan hasil reses ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan yang berafiliasi dengan pelaksanaan Otonomi Khusus.



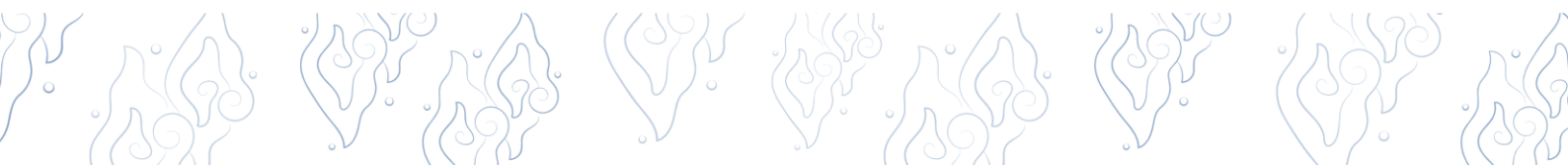
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan skema/pola kerja pendampingan DPR Otsus oleh BP3OKP, dengan output berupa usulan program yang telah tersinkronisasi dengan RIPPP dan RAPPP. 3. Integrasi hasil reses ke dalam RKPD dan program prioritas daerah. 4. Penguatan fungsi pengawasan DPR Otsus terhadap penggunaan dana Otsus agar lebih tepat sasaran. 5. Peningkatan koordinasi lintas sektor melalui forum SHEK BP3OKP. 6. Penguatan program prioritas RAPPP, khususnya: <ul style="list-style-type: none"> • Papua Cerdas (pendidikan) • Papua Sehat (kesehatan dan gizi) • Papua Produktif (ekonomi lokal) 7. Pengembangan sistem monitoring berbasis data untuk memastikan keberlanjutan program. 8. Pelibatan aktif masyarakat dan tokoh adat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan.
<p>Dokumentasi</p>	



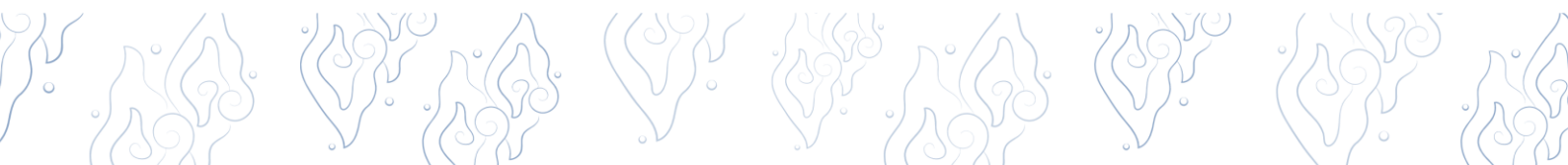


Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua sesuai RAPPP
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis–Jumat, 5–6 Maret 2026, bertempat di Hotel Swiss-Bell Biak

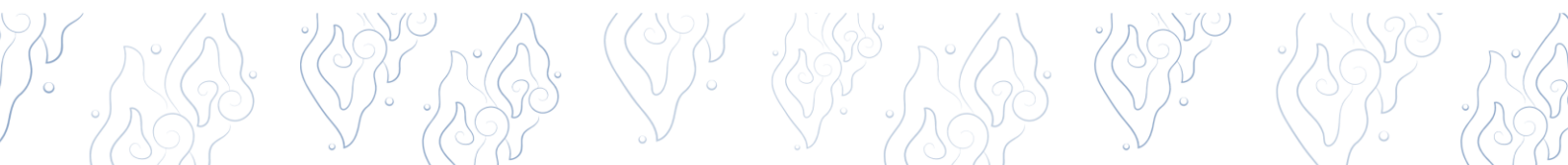


Latar Belakang	<p>Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) memiliki mandat untuk mengawal pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) sebagai instrumen utama pembangunan dalam kerangka Otonomi Khusus.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, diperlukan kesamaan persepsi dan penguatan kapasitas bagi seluruh anggota BPP dan Pokja di enam provinsi di Tanah Papua, guna memastikan efektivitas pelaksanaan program serta keselarasan arah kebijakan pembangunan.</p> <p>Rapat Koordinasi ini merupakan pertemuan pertama BPP se-Tanah Papua yang melibatkan seluruh unsur pimpinan dan Pokja, sebagai forum strategis untuk evaluasi kinerja, pertukaran informasi, serta penetapan komitmen capaian kinerja ke depan.</p> <p>RAPPP Tahun 2025–2029 sebagai dokumen strategis nasional menekankan pendekatan pembangunan terintegrasi melalui fokus Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan stabilitas keamanan (Papua Damai). Namun, dalam implementasinya masih terdapat tantangan berupa belum optimalnya sinkronisasi antara program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>Oleh karena itu, diperlukan forum koordinasi yang mampu memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran pembangunan. BP3OKP melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) berperan strategis dalam mengorkestrasi sinergi lintas sektor tersebut.</p>
-----------------------	---

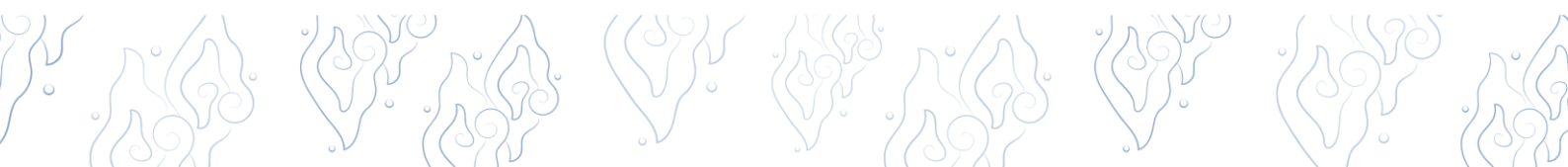


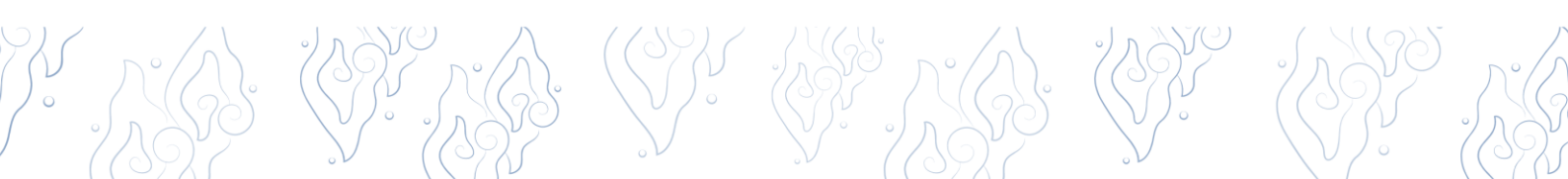
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program percepatan pembangunan Papua sesuai RAPPP. 2. Meningkatkan kualitas kinerja BPP dan Pokja melalui penetapan komitmen indikator dan capaian kinerja. 3. Mensinkronkan program dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 4. Mengidentifikasi program prioritas pada sektor Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. 5. Memastikan integrasi program ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD). 6. Memperkuat peran BP3OKP dalam fungsi SHEK. 7. Mendorong efektivitas pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Papua Barat Daya.
<p>Peserta Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber dari Setwapres, Kementerian Bappenas, dan Kementerian Keuangan 2. Anggota BPP dari 6 provinsi di Tanah Papua 3. Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua dan Papua Barat 4. Seluruh anggota Pokja BPP se-Tanah Papua
<p>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</p>	<p>Sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi</p>
<p>Misi/Keterangan</p>	<p>Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Damai (Polhukam)</p>
<p>Poin-Poin Pembahasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan RIPPP dan RAPPP, termasuk arah kebijakan dan strategi implementasi di wilayah Papua. 2. Indikator kinerja utama (IKU) Pokja, serta penetapan komitmen capaian kinerja tahun 2026. 3. Komitmen kerja dan pakta integritas, termasuk penandatanganan kontrak kinerja oleh seluruh Pokja. 4. Arahan dan penguatan fungsi SHEK, yang disampaikan oleh Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan (secara daring),

	<p>serta diskusi harmonisasi tugas dan fungsi antar provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Perumusan strategi capaian IKU, melalui diskusi dan presentasi masing-masing Pokja. 6. Arah kebijakan RAPPP 2025–2029, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Fokus Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif • Integrasi dengan RPJMN dan kebijakan nasional 7. Sinkronisasi program dan kegiatan, termasuk penyalarsan program pusat dan daerah serta identifikasi program prioritas per sektor. 8. Penguatan perencanaan dan penganggaran, melalui integrasi program ke dalam RPJMD dan RKPD serta optimalisasi Dana Otonomi Khusus. 9. Isu strategis Papua Barat Daya, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur dan konektivitas • Layanan dasar (pendidikan dan kesehatan) • Pengembangan ekonomi lokal dan kawasan strategis 10. Peran BP3OKP dalam SHEK, dalam fasilitasi koordinasi lintas sektor serta monitoring dan evaluasi pembangunan.
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan selama 2 (dua) hari dengan kesepakatan komitmen kerja Pokja di 6 provinsi, termasuk penandatanganan pakta integritas dan rencana pelatihan interoperabilitas sistem terhadap SIPPP. 2. Tersusunnya rencana kerja dan target capaian tahun 2026 oleh masing-masing Pokja, termasuk strategi pencapaian dan mekanisme evaluasi. 3. Terpetakannya program prioritas percepatan pembangunan Papua Barat Daya sesuai RAPPP.



	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tercapainya kesepahaman dalam penyelarasan program antara pemerintah pusat dan daerah. 5. Meningkatnya koordinasi antar OPD, pemerintah daerah, dan BP3OKP. 6. Teridentifikasinya kesenjangan (gap) dan kebutuhan intervensi pada sektor prioritas. 7. Adanya komitmen untuk mengintegrasikan program RAPPP ke dalam dokumen perencanaan daerah.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pertemuan rutin untuk evaluasi program dan kinerja secara berkala. 2. Menerapkan evaluasi kinerja berbasis indikator yang jelas dan terukur, melalui mekanisme evaluasi triwulanan. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus untuk mendukung program prioritas RAPPP, khususnya pada sektor Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui mekanisme SHEK BP3OKP. 5. Memperkuat kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam implementasi program.
<p>Dokumentasi</p>	

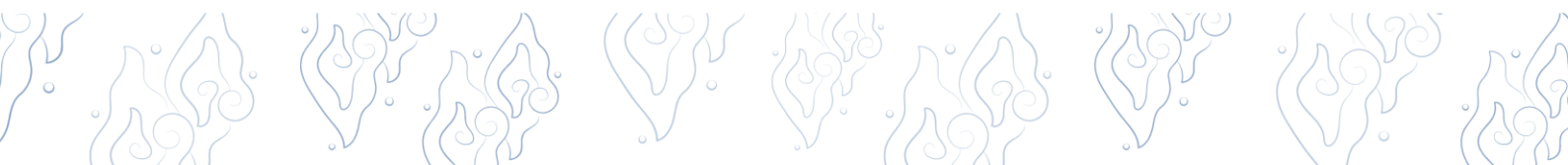




Kegiatan 3

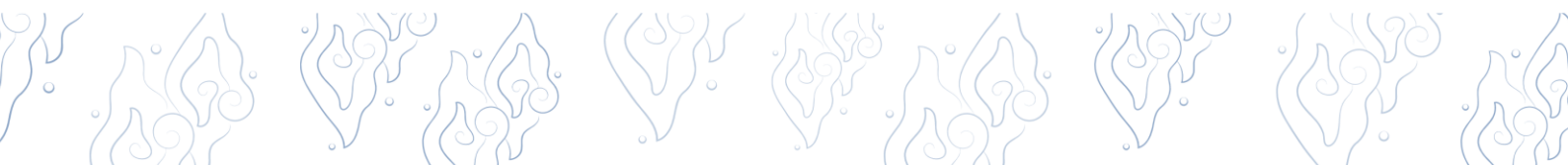
Nama Kegiatan	Pertemuan dengan Rektor Universitas Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong beserta Tim
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 9 Maret 2026, bertempat di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Latar Belakang	<p>Kemitraan dengan perguruan tinggi merupakan salah satu faktor penting bagi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam menjalankan fungsi pengawasan, koordinasi, serta percepatan pembangunan di Tanah Papua. Sejak awal, Universitas Muhammadiyah Sorong (UNIMUDA) telah menjadi mitra strategis BPP Papua Barat Daya dalam mendukung pelaksanaan misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.</p> <p>UNIMUDA Sorong merupakan salah satu perguruan tinggi swasta dengan akreditasi unggul di wilayah Maluku dan Papua, serta memiliki kontribusi besar dalam pendidikan Orang Asli Papua (OAP), dengan proporsi mahasiswa OAP mencapai sekitar 80%. Selain itu, UNIMUDA juga memiliki jejaring kemitraan yang luas, termasuk dengan pemerintah daerah dan mahasiswa internasional dari Papua Nugini (PNG).</p> <p>Salah satu inisiatif strategis UNIMUDA adalah pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sorong, yang sejalan dengan program prioritas nasional dan diharapkan dapat meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan di Papua Barat Daya, khususnya di wilayah yang dekat dengan pemukiman OAP.</p> <p>Namun demikian, pembangunan rumah sakit tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pendanaan, perizinan, koordinasi lintas sektor, maupun</p>

	<p>percepatan penyelesaian fisik. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi intensif antara UNIMUDA, pemerintah daerah, dan BP3OKP dalam menjalankan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK).</p> <p>Pertemuan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengidentifikasi permasalahan, menyusun langkah percepatan, serta memastikan pembangunan rumah sakit dan pengembangan pendidikan di UNIMUDA selaras dengan RAPPP 2025–2029.</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi terkait rencana fungsionalisasi RS PKU Muhammadiyah Sorong. 2. Mensinkronkan program dan kegiatan UNIMUDA, termasuk rencana pembukaan program studi dan mata kuliah baru. 3. Mengkoordinasikan strategi percepatan penyiapan SDM/lulusan UNIMUDA agar siap memasuki dunia kerja. 4. Mengidentifikasi progres dan kendala pembangunan Rumah Sakit UNIMUDA. 5. Mendorong percepatan penyelesaian pembangunan rumah sakit. 6. Mensinkronkan dukungan program dan kebijakan antara UNIMUDA, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BP3OKP. 7. Memastikan pembangunan rumah sakit mendukung misi Papua Sehat dalam RAPPP. <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyusun langkah tindak lanjut yang terukur dan terkoordinasi.
<p>Peserta Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP Papua Barat Daya 2. Rektor UNIMUDA Sorong

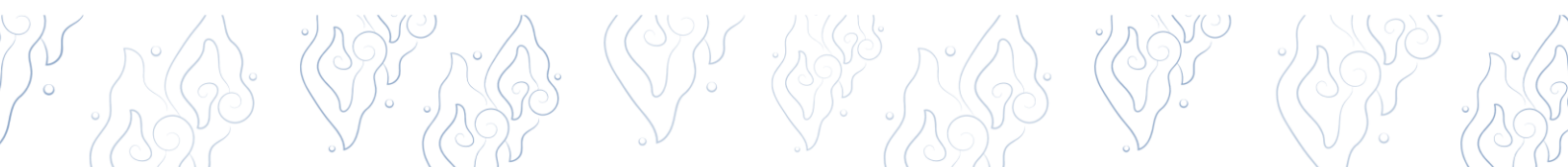


	<ol style="list-style-type: none"> 3. Sekretaris UNIMUDA Sorong 4. Anggota Pokja Sehat, Cerdas, dan Produktif BPP Papua Barat Daya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi dan koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	<p>Hasil Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen UNIMUDA akan menindaklanjuti saran dari BPP dalam rangka percepatan fungsionalisasi RS PKU Muhammadiyah Sorong. 2. BPP Papua Barat Daya menyambut baik rencana pengembangan program akademik UNIMUDA, dan Pokja Papua Cerdas akan memberikan pendampingan apabila diperlukan. 3. Teridentifikasi bahwa penyiapan SDM siap kerja, khususnya bagi OAP, merupakan tantangan strategis. Rencana pengembangan lembaga berbasis keterampilan kerja dinilai sejalan dengan Asta Cita Presiden serta RAPP 2025–2029, khususnya dalam Misi Papua Produktif. 4. Dalam konteks Papua Cerdas, kebutuhan dunia kerja perlu diintegrasikan dalam kurikulum, dan pendampingan transisi lulusan ke dunia kerja menjadi isu penting yang perlu ditangani. 5. Teridentifikasinya kondisi aktual serta progres pembangunan Rumah Sakit UNIMUDA. 6. Terpetakannya kendala utama yang menghambat penyelesaian pembangunan. 7. Terbangunnya komitmen bersama untuk mempercepat penyelesaian pembangunan rumah sakit. 8. Terjalinnnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, UNIMUDA, dan BP3OKP.

	<p>9. Disepakatinya langkah dan koordinasi tindak lanjut, termasuk rencana fasilitasi koordinasi lanjutan melalui Wakil Presiden RI.</p>
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen UNIMUDA akan menindaklanjuti saran dari BPP dalam rangka percepatan fungsionalisasi RS PKU Muhammadiyah Sorong. 2. BPP Papua Barat Daya menyambut baik rencana pengembangan program akademik UNIMUDA, dan Pokja Papua Cerdas akan memberikan pendampingan apabila diperlukan. 3. Teridentifikasi bahwa penyiapan SDM siap kerja, khususnya bagi OAP, merupakan tantangan strategis. Rencana pengembangan lembaga berbasis keterampilan kerja dinilai sejalan dengan Asta Cita Presiden serta RAPP 2025–2029, khususnya dalam Misi Papua Produktif. 4. Dalam konteks Papua Cerdas, kebutuhan dunia kerja perlu diintegrasikan dalam kurikulum, dan pendampingan transisi lulusan ke dunia kerja menjadi isu penting yang perlu ditangani. 5. Teridentifikasinya kondisi aktual serta progres pembangunan Rumah Sakit UNIMUDA. 6. Terpetakannya kendala utama yang menghambat penyelesaian pembangunan. 7. Terbangunnya komitmen bersama untuk mempercepat penyelesaian pembangunan rumah sakit. 8. Terjalannya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, UNIMUDA, dan BP3OKP. 9. Disepakatinya langkah dan koordinasi tindak lanjut, termasuk rencana fasilitasi koordinasi lanjutan melalui Wakil Presiden RI.



<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program antara BPP Papua Barat Daya dan UNIMUDA. 2. Menyusun dokumen pengembangan lembaga pendidikan berbasis keterampilan kerja untuk dibahas bersama pemerintah daerah. 3. Melakukan fasilitasi koordinasi melalui Setwapres oleh BP3OKP dalam rangka percepatan pembangunan rumah sakit. 4. Mendorong penguatan dukungan pemerintah daerah melalui integrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD). 5. Mengusulkan dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait lainnya. 6. Mempersiapkan operasional rumah sakit, termasuk pemenuhan SDM tenaga kesehatan dan peralatan medis.
<p>Dokumentasi</p>	





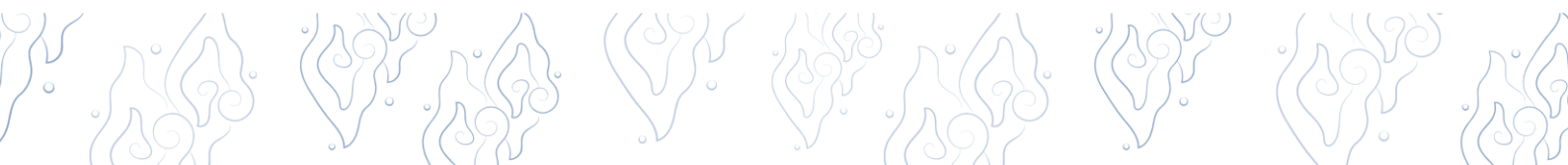
Kegiatan 4

Nama Kegiatan	Pertemuan dengan Tim Kompas TV
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 9 Maret 2026, bertempat di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Latar Belakang	<p>Riset merupakan salah satu instrumen penting dalam memperoleh data yang akurat untuk diolah menjadi informasi yang bermanfaat, khususnya dalam rangka evaluasi pelaksanaan pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, media massa seperti Kompas TV melalui unit Litbang memiliki kapasitas dalam melakukan riset dan publikasi yang dapat mendukung fungsi evaluasi pembangunan.</p> <p>Sebagai lembaga yang memiliki fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), BP3OKP tidak hanya berperan dalam pengawasan pembangunan, tetapi juga dalam memastikan diseminasi informasi pembangunan kepada masyarakat berjalan secara tepat, akurat, dan konstruktif.</p> <p>Peran media massa, khususnya media nasional, menjadi penting dalam membangun narasi positif pembangunan Papua, meningkatkan transparansi, serta memperkuat partisipasi publik. Oleh karena itu, pertemuan dengan Tim Kompas TV dilaksanakan</p>

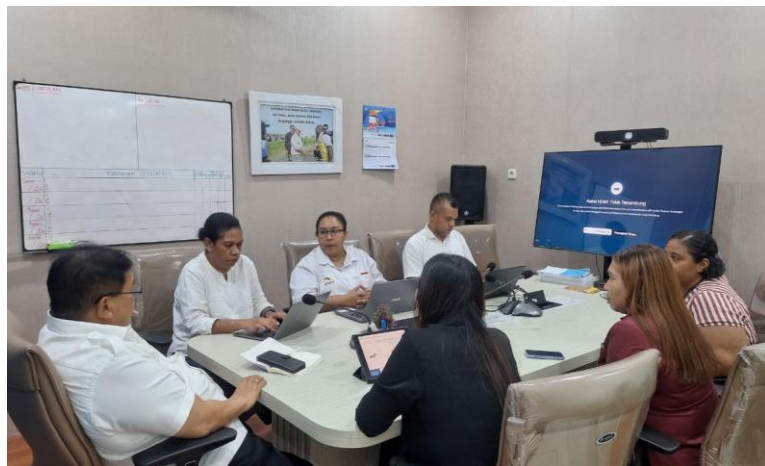
	<p>sebagai langkah awal untuk menjajaki kerja sama strategis dalam publikasi serta evaluasi program percepatan pembangunan Papua Barat Daya, khususnya dalam kerangka RAPPP (Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai).</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendengarkan penawaran kerja sama dari Kompas TV dalam evaluasi program pembangunan. 2. Mempelajari proposal bisnis Litbang Kompas. 3. Membangun komunikasi dan kemitraan strategis antara BP3OKP dan Kompas TV. 4. Mendorong publikasi program percepatan pembangunan Papua Barat Daya secara luas. 5. Menyampaikan capaian dan program prioritas BP3OKP kepada publik. 6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan melalui media. 7. Mengidentifikasi peluang kerja sama dalam produksi konten dan peliputan kegiatan.
<p>Peserta Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Kompas TV 2. Anggota BP3OKP Papua Barat Daya 3. Anggota Pokja Sehat, Cerdas, dan Produktif BP3OKP Papua Barat Daya
<p>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</p>	<p>Diskusi prospek program, sinkronisasi, dan koordinasi</p>
<p>Misi/Keterangan</p>	<p>Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Damai (Polhukam), serta penguatan komunikasi publik dan publikasi kinerja BP3OKP</p>
<p>Poin-Poin Pembahasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penawaran program dari Kompas TV, termasuk peluang kerja sama dalam evaluasi dan publikasi pembangunan. 2. Presentasi bisnis Litbang Kompas, terkait peran riset dalam mendukung evaluasi kinerja dan penyusunan kebijakan.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peran Litbang Kompas dalam mendukung tugas BP3OKP, khususnya dalam fungsi evaluasi dan publikasi hasil SHEK. 4. Profil dan peran BP3OKP Papua Barat Daya, termasuk fungsi SHEK dan program prioritas dalam kerangka RAPPP. 5. Peran media dalam pembangunan Papua, sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun narasi positif dan transparansi pembangunan. 6. Peluang kerja sama dengan Kompas TV, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Peliputan kegiatan strategis BP3OKP • Produksi konten tematik (Papua Sehat, Cerdas, Produktif) • Program khusus/feature pembangunan Papua Barat Daya 7. Strategi komunikasi publik, meliputi penyebarluasan informasi pembangunan, edukasi masyarakat, serta penguatan branding pembangunan Papua. 8. Rencana tindak lanjut kerja sama, termasuk penyusunan konsep kerja sama serta penjadwalan peliputan dan produksi konten.
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disarankan agar penawaran kerja sama dikomunikasikan lebih lanjut dengan Sekretariat BPP di Jayapura agar dapat berlaku secara menyeluruh di Tanah Papua. 2. Teridentifikasinya potensi pemanfaatan Litbang Kompas sebagai instrumen evaluasi kinerja BP3OKP, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan komitmen kerja sama tahunan • Pemanfaatan riset sebagai alat ukur kinerja BPP di daerah • Media sebagai sarana publikasi yang independen dan akuntabel

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Terjalannya komunikasi awal antara BP3OKP dan Kompas TV. 4. Adanya kesepahaman untuk menjajaki kerja sama dalam publikasi pembangunan Papua Barat Daya. 5. Teridentifikasinya peluang kolaborasi dalam produksi konten dan peliputan kegiatan. 6. Meningkatnya pemahaman bersama mengenai peran media dalam mendukung percepatan pembangunan. 7. Adanya komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama dalam bentuk yang lebih konkret.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertimbangkan kerja sama dengan Litbang Kompas sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja BP3OKP. 2. Melakukan pembahasan lanjutan dengan Sekretariat BPP terkait skema kerja sama, termasuk kemungkinan dukungan melalui APBD. 3. Menyusun draft kerja sama (MoU/PKS) antara BP3OKP dan Kompas TV. 4. Menetapkan focal point komunikasi dari masing-masing pihak. 5. Menyusun rencana konten bersama, khususnya terkait program RAPP. 6. Melaksanakan peliputan kegiatan strategis BP3OKP secara berkala. 7. Memperkuat strategi komunikasi publik BP3OKP melalui media nasional dan lokal. 8. Melakukan monitoring dan evaluasi kerja sama untuk memastikan efektivitas publikasi.

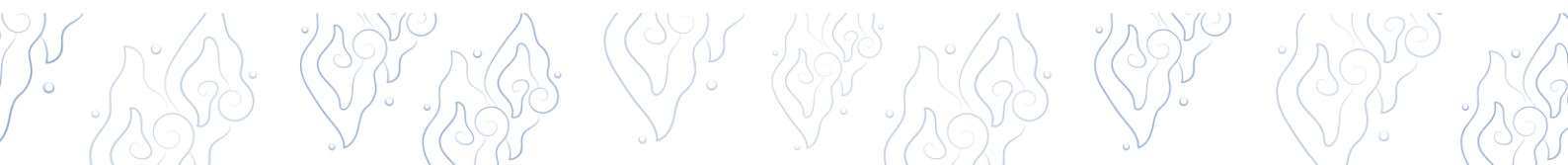


Dokumentasi




Kegiatan 5

Nama Kegiatan	FGD Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Tahun 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 10 Maret 2026, dilaksanakan secara daring (Zoom Meeting) di Sekretariat BPP Papua Barat Daya



<p>Latar Belakang</p>	<p>Dana Desa merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan berbasis desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kesenjangan antar wilayah, termasuk di Provinsi Papua Barat Daya. Dalam implementasinya, penyaluran Dana Desa harus dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, serta akuntabel.</p> <p>Di sisi lain, Kajian Fiskal Regional Tahun 2025 memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi fiskal daerah, termasuk kapasitas keuangan, pola belanja, serta tantangan pengelolaan anggaran di tingkat daerah dan desa. Diseminasi kajian ini menjadi penting sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis data.</p> <p>Melalui kegiatan FGD ini, diharapkan tercipta pemahaman bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait mengenai strategi penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang lebih optimal, serta pemanfaatan hasil kajian fiskal sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mekanisme penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026. 2. Meningkatkan pemahaman stakeholder terhadap hasil Kajian Fiskal Regional Tahun 2025. 3. Mengidentifikasi kendala dalam penyaluran dan pengelolaan Dana Desa. 4. Mendorong pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan efektif. 5. Mengintegrasikan hasil kajian fiskal dalam perencanaan pembangunan daerah dan desa.
<p>Peserta Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Keuangan (KPPN/Kanwil DJPb) 2. BP3OKP se-Tanah Papua

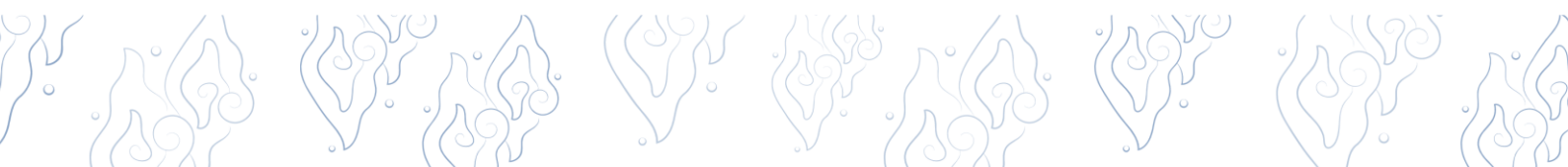
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (BPKAD dan Bappeda) 4. Pemerintah Kabupaten/Kota (BPKAD dan DPMK/PMD) 5. Pemangku kepentingan terkait lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, evaluasi, dan koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Damai (Polhukam)
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026, meliputi mekanisme dan tahapan penyaluran, persyaratan administrasi dan kinerja, serta perubahan kebijakan terbaru. 2. Evaluasi penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya, mencakup capaian penyaluran, permasalahan dan kendala, serta praktik baik (best practice). 3. Diseminasi Kajian Fiskal Regional Tahun 2025, meliputi kondisi fiskal daerah, kapasitas keuangan daerah, serta pola belanja dan prioritas pembangunan. 4. Isu strategis pengelolaan Dana Desa, antara lain terkait akuntabilitas dan transparansi, sistem pengawasan dan pelaporan, serta potensi risiko penyimpangan. 5. Sinkronisasi Dana Desa dengan program pembangunan, termasuk integrasi dengan RPJMD dan RKPD, dukungan terhadap program RAPP (Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif), serta keterkaitan dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemahaman peserta terhadap kebijakan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Teridentifikasinya permasalahan utama dalam penyaluran dan pengelolaan Dana Desa. 3. Tersosialisasikannya hasil Kajian Fiskal Regional Tahun 2025 sebagai dasar pengambilan kebijakan. 4. Tercapainya kesepahaman untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. 5. Terbangunnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa. 2. Penguatan sistem pengawasan dan pelaporan, termasuk optimalisasi peran Inspektorat. 3. Pemanfaatan Kajian Fiskal Regional sebagai dasar perencanaan dan penganggaran daerah. 4. Percepatan pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Desa oleh pemerintah daerah dan desa. 5. Integrasi penggunaan Dana Desa dengan program prioritas RAPP. 6. Pengembangan sistem data terintegrasi untuk monitoring penyaluran dan penggunaan Dana Desa.
<p>Dokumentasi</p>	



Kegiatan 6

Nama Kegiatan	SHEK Misi Papua Cerdas dan Produktif: Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di Ayawasi, Kabupaten Maybrat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jumat, 13 Maret 2026, bertempat di SD YPPK St. Petrus Ayawasi, Kabupaten Maybrat
Latar Belakang	<p>Kurikulum Merdeka merupakan salah satu kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan kompetensi peserta didik.</p> <p>Di wilayah Papua Barat Daya, khususnya Kabupaten Maybrat, implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (guru), minimnya sarana dan prasarana pendidikan, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pendampingan. Kondisi ini turut memengaruhi</p>



	<p>optimalisasi penerapan kurikulum pada satuan pendidikan, khususnya pada sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik (YPPK).</p> <p>Menyikapi hal tersebut, pihak yayasan melaksanakan kegiatan sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) serta pendampingan pengelolaan dana BOS bagi kepala sekolah dan guru pada satuan pendidikan YPPK di Kabupaten Maybrat.</p> <p>Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) turut mengambil peran dalam mendukung peningkatan kapasitas tenaga pendidik serta mendorong integrasi pembelajaran dengan potensi lokal dalam kerangka Papua Cerdas dan Papua Produktif sesuai RAPPP 2025–2029.</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mensosialisasikan kebijakan dan konsep Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). 4. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru dalam penerapan IKM. 5. Mendorong integrasi pembelajaran dengan potensi lokal (Papua Produktif). 6. Memperkuat sinergi antara BP3OKP, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. 7. Mendukung pencapaian misi Papua Cerdas dalam RAPPP. <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan fungsi SHEK dalam rangka pendampingan pengelolaan yayasan terhadap satuan pendidikan.
<p>Peserta Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pimpinan BPP Papua Barat Daya 6. Pokja Papua Cerdas BPP Papua Barat Daya

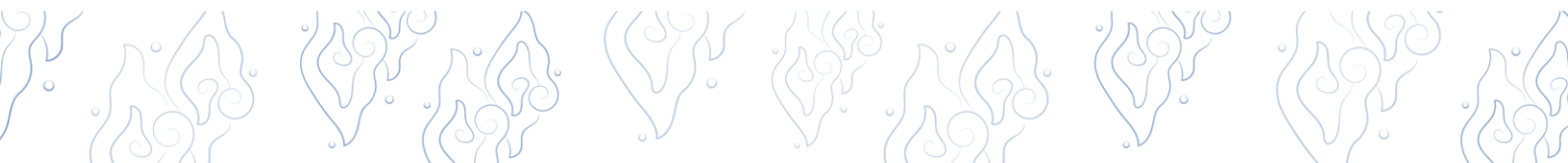
	<p>7. Pokja Papua Produktif BPP Papua Barat Daya</p> <p>8. Pengurus Yayasan</p> <p>9. Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat</p> <p>10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maybrat</p> <p>11. Kepala Sekolah satuan pendidikan YPPK se-Kabupaten Maybrat</p> <p>12. Pengelola/Operator BOS</p> <p>13. Pengawas sekolah</p> <p>Pemangku kepentingan pendidikan lainnya</p>
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK)
Misi/Keterangan	Papua Cerdas, Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	<p>6. Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), meliputi prinsip, karakteristik, serta fokus pada penguatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik.</p> <p>7. Strategi implementasi IKM di Kabupaten Maybrat, termasuk adaptasi kurikulum sesuai konteks lokal serta peran sekolah dan guru dalam pelaksanaannya.</p> <p>8. Integrasi Papua Cerdas dan Papua Produktif, melalui pembelajaran berbasis potensi lokal (pertanian, budaya, lingkungan) serta penguatan keterampilan hidup (life skills).</p> <p>9. Permasalahan dan tantangan di lapangan, antara lain keterbatasan SDM guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta akses terhadap pelatihan dan pendampingan.</p> <p>10. Peran BP3OKP dalam SHEK, khususnya dalam fasilitasi koordinasi lintas sektor serta monitoring dan evaluasi implementasi program.</p>

	<p>Agenda pembukaan kegiatan, yang meliputi arahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat dan Anggota BPP, serta penyampaian materi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pokja Papua Cerdas.</p>
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasinya kendala utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan YPPK di Kabupaten Maybrat, antara lain keterbatasan SDM yang memahami kurikulum, keterampilan teknologi informasi, serta keterbatasan akses jaringan. 2. Faktor keamanan wilayah turut menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 3. Yayasan YPPK menunjukkan komitmen dalam mendorong percepatan Papua Cerdas di Kabupaten Maybrat melalui peningkatan kualitas guru dan pembelajaran, antara lain melalui skema tutor sebaya yang melibatkan guru dari Kota Sorong. 4. Meningkatnya pemahaman peserta terhadap konsep dan implementasi Kurikulum Merdeka. 5. Teridentifikasinya tantangan utama dalam implementasi IKM di daerah. 6. Meningkatnya komitmen guru dan pemangku kepentingan dalam penerapan IKM. 7. Terbangunnya sinergi antara BP3OKP, Dinas Pendidikan, dan satuan pendidikan. <p>Munculnya dorongan untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan potensi lokal sebagai bagian dari Papua Produktif.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pelatihan lanjutan bagi guru terkait implementasi Kurikulum Merdeka. 2. Penguatan pendampingan sekolah melalui Dinas Pendidikan dan BP3OKP.

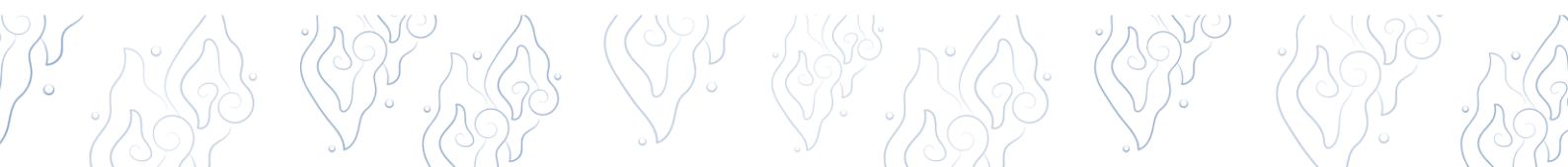
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan modul pembelajaran berbasis potensi lokal (pertanian, budaya, dan lainnya). 4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kabupaten Maybrat. 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi IKM melalui mekanisme SHEK. 6. Integrasi program pendidikan dengan RAPP, khususnya dalam mendukung Papua Cerdas dan Papua Produktif. <p>Pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan implementasi Kurikulum Merdeka ke depan.</p>
<p>Dokumentasi</p>	

Kegiatan 7


<p>Nama Kegiatan</p>	<p>Visitasi Pangan Murah di Pasar Kajase Kabupaten Sorong Selatan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p>	<p>Rabu, 18 Maret 2026, bertempat di Pasar Kajase, Kabupaten Sorong Selatan</p>



<p>Latar Belakang</p>	<p>Ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Papua Barat Daya. Fluktuasi harga pangan serta keterbatasan distribusi seringkali berdampak pada daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.</p> <p>Program pangan murah merupakan salah satu intervensi strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Kegiatan visitasi ini dilaksanakan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program pangan murah di Pasar Kajase Kabupaten Sorong Selatan, sekaligus memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran program.</p> <p>BP3OKP melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) berperan dalam memastikan program ini terintegrasi dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua, khususnya dalam mendukung agenda Papua Sehat (pemenuhan gizi masyarakat) dan Papua Produktif (stabilisasi ekonomi masyarakat).</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring pelaksanaan program pangan murah di Pasar Kajase. 2. Menilai keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. 3. Mengidentifikasi kendala dalam distribusi dan pelaksanaan program. 4. Mendorong stabilisasi harga pangan di tingkat masyarakat. 5. Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan BP3OKP.



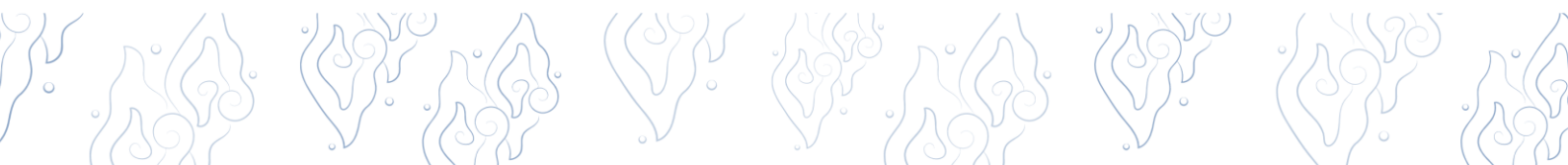
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan (OPD terkait, antara lain Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan) 2. BP3OKP Papua Barat Daya 3. Pengelola pasar/pedagang 4. Masyarakat/konsumen 5. Pemangku kepentingan terkait lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat, Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan program pangan murah, meliputi jenis komoditas yang disediakan serta mekanisme distribusi dan penjualan kepada masyarakat. 2. Kondisi harga dan ketersediaan pangan, termasuk perbandingan antara harga pasar umum dan harga subsidi, serta ketersediaan stok pangan. 3. Dampak program terhadap masyarakat, khususnya dari sisi keterjangkauan harga serta tingkat respons dan antusiasme masyarakat. 4. Permasalahan dan tantangan, antara lain terkait distribusi dan logistik, ketersediaan pasokan, serta aspek pengawasan agar program tepat sasaran. 5. Sinkronisasi program dengan RAPPP, khususnya dalam mendukung Papua Sehat melalui pemenuhan gizi masyarakat dan Papua Produktif melalui stabilitas ekonomi.
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pangan murah telah berjalan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. 2. Harga komoditas pangan dalam program lebih terjangkau dibandingkan harga pasar umum. 3. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan program.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Teridentifikasinya beberapa kendala dalam distribusi dan ketersediaan stok pangan. 5. Terbangunnya koordinasi antara pemerintah daerah dan BP3OKP dalam pelaksanaan program.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan frekuensi pelaksanaan program pangan murah, khususnya di wilayah dengan tingkat harga tinggi. 2. Memperkuat sistem distribusi dan logistik pangan guna menjaga ketersediaan stok. 3. Melakukan pengawasan yang lebih ketat agar program tepat sasaran. 4. Mengintegrasikan program pangan murah dengan program ketahanan pangan lokal. 5. Mendorong pelibatan pelaku usaha lokal (OAP) dalam rantai distribusi pangan. 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui mekanisme SHEK BP3OKP.
<p>Dokumentasi</p>	



Kegiatan 8

<p>Nama Kegiatan</p>	<p>Rapat Pembahasan Program Prioritas Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sorong Selatan</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p>	<p>Rabu, 18 Maret 2026, bertempat di Hotel Mratuwa, Kabupaten Sorong Selatan</p>
<p>Latar Belakang</p>	<p>Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan bagian dari program prioritas strategis nasional dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat ekonomi masyarakat berbasis desa/kelurahan.</p> <p>Program MBG berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik, sebagai bagian dari agenda Papua Sehat, sedangkan KDKMP</p>



	<p>diarahkan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi desa, meningkatkan akses permodalan, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sebagai bagian dari Papua Produktif.</p> <p>Di Kabupaten Sorong Selatan, implementasi kedua program tersebut memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat agar berjalan efektif dan terintegrasi dengan kebijakan daerah. BP3OKP melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) berperan dalam memastikan keselarasan program dengan RAPPP, RPJMD, serta kebijakan nasional.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan dan membahas implementasi program MBG dan KDKMP di Kabupaten Sorong Selatan. 2. Mensinkronkan program dengan kebijakan daerah dan RAPPP (Papua Sehat dan Papua Produktif). 3. Mengidentifikasi kesiapan daerah dalam pelaksanaan program. 4. Mengidentifikasi kendala dan kebutuhan dukungan pelaksanaan program. 5. Menyusun langkah tindak lanjut yang terkoordinasi.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BP3OKP Papua Barat Daya 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan (Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UMKM, dan OPD terkait lainnya) 3. Kepala kampung 4. Pengurus koperasi/calon pengurus KDKMP 5. Pemangku kepentingan terkait lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat, Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan program MBG dan KDKMP, meliputi tujuan, sasaran, serta mekanisme pelaksanaan program.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kesiapan daerah, mencakup ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (dapur, logistik MBG), serta kesiapan kelembagaan koperasi di tingkat desa/kelurahan. 3. Implementasi MBG, meliputi sasaran penerima manfaat (peserta didik), pola distribusi makanan bergizi, serta pemanfaatan pangan lokal. 4. Penguatan KDKMP, meliputi pembentukan dan penguatan koperasi desa/kelurahan, akses permodalan, manajemen usaha, serta peran koperasi dalam mendukung distribusi pangan. 5. Permasalahan dan tantangan, antara lain terkait pendanaan, kapasitas SDM, serta koordinasi lintas sektor. 6. Peran BP3OKP (SHEK), khususnya dalam fasilitasi koordinasi lintas sektor serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemahaman peserta terhadap program MBG dan KDKMP. 2. Teridentifikasinya tingkat kesiapan daerah dalam implementasi program. 3. Terpetakannya kebutuhan dukungan sarana, SDM, dan kelembagaan. 4. Tercapainya kesepahaman untuk mengintegrasikan program dalam perencanaan daerah. 5. Terbangunnya komitmen lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan koperasi desa/kelurahan (KDKMP) melalui pelatihan dan pendampingan. 2. Optimalisasi pemanfaatan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG. 3. Penguatan koordinasi lintas sektor melalui forum SHEK BP3OKP.

	<ol style="list-style-type: none">4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung program MBG, seperti dapur dan logistik.5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.
Dokumentasi	

BAB IV

CAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

4.1 Capaian

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK yang telah dilakukan oleh BPP Papua Barat Daya pada bulan Maret 2026, berikut beberapa capaian dan/ atau kemajuan strategis yang diperoleh:

1. Penguatan Peran BPP sebagai Orkestrator Pembangunan Papua

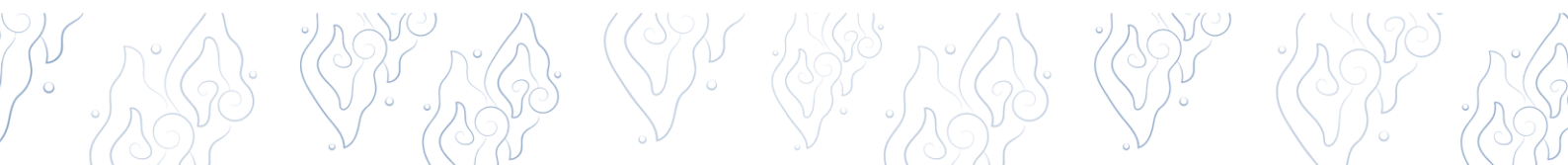
- a. Meningkatnya peran BP3OKP dalam memfasilitasi sinkronisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder di wilayah Papua Barat Daya.
- b. Terbangunnya posisi BP3OKP sebagai clearing house dalam penyelarasan kebijakan pembangunan berbasis RIPP dan RAPP.
- c. Menguatnya fungsi pendampingan terhadap pemerintah daerah dan DPR Otsus dalam memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran pembangunan.

2. Penguatan Tata Kelola Program dan Integrasi Kebijakan RAPP

- a. Terlaksananya berbagai forum koordinasi strategis yang mendorong integrasi program pusat dan daerah ke dalam dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD).
- b. Terpetakannya program prioritas dan kebutuhan intervensi pada sektor Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai.
- c. Meningkatnya komitmen lintas sektor dalam mengintegrasikan program prioritas RAPP ke dalam kebijakan daerah.

3. Penguatan *Evidence-Based Policy* melalui Identifikasi Isu Strategis

- a. Teridentifikasinya akar permasalahan pada sektor pendidikan, khususnya terkait penurunan capaian SPM, kelemahan tata kelola data, dan keterbatasan SDM.
- b. Terpetakannya tantangan sektor kesehatan, termasuk beban penyakit menular (ATM), keterbatasan layanan, dan faktor sosial budaya.



- c. Teridentifikasinya potensi dan risiko dalam sektor ekonomi, termasuk ketergantungan pasokan pangan, inflasi daerah, serta keterbatasan akses usaha bagi OAP.
- d. Tersedianya bahan analisis kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan intervensi program yang lebih tepat sasaran.

4. Penguatan Model Intervensi Program Terpadu di Tingkat Lokus

- a. Terimplementasinya model integrasi program pendidikan dan kesehatan melalui kolaborasi SSH dan MBG yang menunjukkan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran dan gizi peserta didik.
- b. Terlaksananya uji lapangan program ketahanan pangan berbasis lahan produktif yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- c. Teridentifikasinya praktik baik (best practice) pelaksanaan program MBG dalam mendukung penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi lokal.

5. Penguatan Sistem Pengendalian Ekonomi dan Ketahanan Pangan

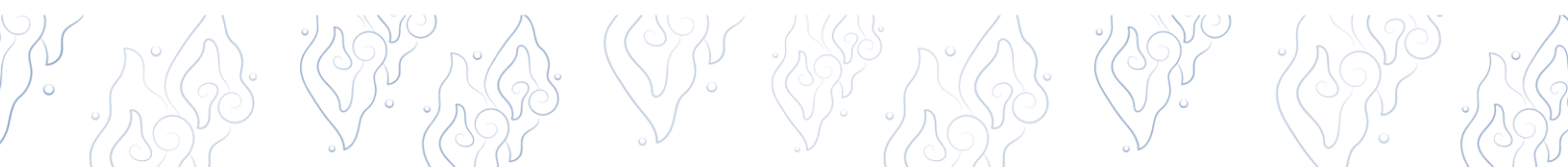
- a. Terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang HBKN melalui koordinasi lintas sektor.
- b. Teridentifikasinya dinamika inflasi daerah sebagai dampak peningkatan aktivitas ekonomi dan distribusi pangan.
- c. Terpetakannya kebutuhan penguatan sistem distribusi dan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan antar wilayah.

6. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Sumber Daya Strategis

- a. Terlaksananya pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi melalui UPTD BLUD KKPD Raja Ampat.
- b. Menguatnya arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam berbasis keberlanjutan dan peningkatan nilai ekonomi daerah.
- b. Teridentifikasinya kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan sektor strategis.

7. Penguatan Sinergi Sosial, Apresiasi, dan Stabilitas Papua Damai

- a. Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui berbagai forum, termasuk kegiatan MRP dan reses DPR Otsus sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.



- b. Teridentifikasinya isu-isu strategis sosial, termasuk perlindungan hak Orang Asli Papua (OAP), kesenjangan layanan dasar, serta permasalahan sosial di masyarakat.
- c. Terbangunnya ruang dialog antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam mendukung stabilitas sosial dan rekonsiliasi berbasis kearifan lokal.
- d. Teridentifikasinya kondisi dan dampak gangguan keamanan akibat aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Maybrat, yang berdampak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
- e. Menguatnya kesepahaman lintas sektor untuk mendorong pendekatan penanganan konflik secara terpadu, melalui kombinasi pendekatan keamanan, sosial, budaya, dan pembangunan wilayah dalam kerangka Papua Damai.
- f. Meningkatnya komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan stakeholder dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak konflik secara berkelanjutan.

8. Penguatan Ekosistem Ekonomi Lokal dan Sumber Daya Alam

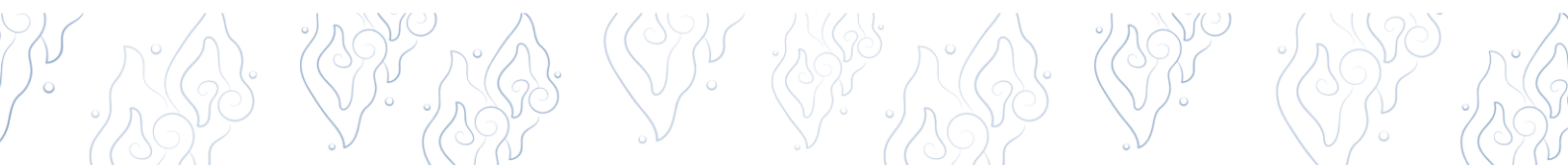
- 1. Terbukanya peluang pengembangan sektor energi melalui pemanfaatan gas dan pengambilan Participating Interest (PI) 10% oleh daerah.
- 2. Menguatnya arah kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong sebagai pusat hilirisasi industri.
- 3. Terbangunnya komunikasi dan kolaborasi dengan pelaku usaha OAP dalam mendorong ekonomi berbasis masyarakat lokal.
- 4. Teridentifikasinya potensi peningkatan PAD melalui optimalisasi perizinan dan investasi daerah.

4.2 Permasalahan

Meskipun berbagai capaian/kemajuan telah diperoleh, terdapat sejumlah permasalahan yang masih memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut:

1. Belum Optimalnya Integrasi Program dan Perencanaan

- a. Masih terdapat ketidakselarasan antara program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam implementasi RAPP.



- b. Integrasi program ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) belum sepenuhnya berjalan optimal.
- c. Koordinasi lintas sektor masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara sistematis.

2. Keterbatasan Tata Kelola Data dan *Evidence-Based Policy*

- a. Pengelolaan data pembangunan, khususnya pada sektor pendidikan, masih lemah dan belum terintegrasi.
- b. Rendahnya tingkat penginputan dan validasi data menyebabkan indikator kinerja tidak menggambarkan kondisi riil.
- c. Keterbatasan data yang akurat menghambat penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

3. Permasalahan Layanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan)

- a. Kualitas layanan pendidikan masih belum merata, ditandai dengan rendahnya kemampuan dasar peserta didik di beberapa wilayah.
- b. Keterbatasan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana layanan dasar.
- c. Masih tingginya beban penyakit menular (AIDS, Malaria, Tuberkulosis) serta faktor sosial yang mempengaruhi penanganannya.

4. Keterbatasan Penguatan Ekonomi Lokal dan Akses Usaha

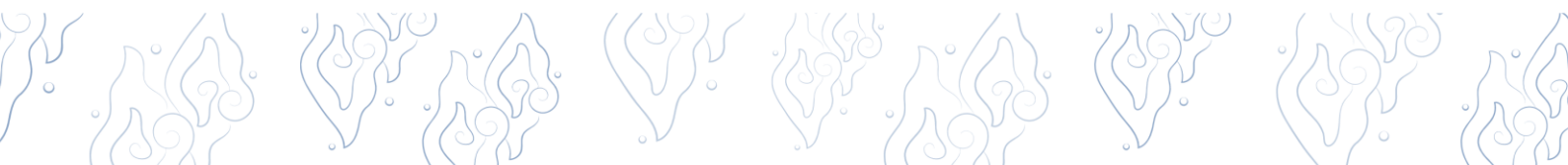
- a. Pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) masih menghadapi keterbatasan akses permodalan, kapasitas manajerial, dan akses pasar.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.
- c. Sistem perizinan dan iklim investasi daerah belum sepenuhnya mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal.

5. Permasalahan Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga

- a. Ketergantungan pasokan pangan antar wilayah masih tinggi, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga.
- b. Keterbatasan produksi pangan lokal dan belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan daerah.
- c. Sistem distribusi dan logistik pangan belum sepenuhnya efisien.

6. Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan dan SDM

- a. Kapasitas aparatur dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi program masih belum merata.



- b. Kelembagaan pengelola sektor strategis masih membutuhkan penguatan, baik dari sisi sistem maupun SDM.
- c. Beban kerja OPD teknis yang tinggi belum diimbangi dengan dukungan manajemen yang optimal.

7. Permasalahan Stabilitas dan Keamanan Sosial

- a. Masih terdapat gangguan keamanan di beberapa wilayah, termasuk dampak aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Maybrat.
Dampak gangguan keamanan terhadap layanan dasar, aktivitas ekonomi, serta mobilitas masyarakat.
- b. Permasalahan sosial seperti minuman keras, kekerasan, dan kerentanan sosial lainnya masih menjadi tantangan.

4.3 Tantangan

Dalam rangka percepatan pembangunan di Papua Barat Daya, terdapat beberapa tantangan strategis yang perlu diantisipasi dan ditangani secara komprehensif, yaitu:

1. Penguatan Peran BPP dalam Tusi SHEK

Mengoptimalkan peran BP3OKP agar semakin efektif sebagai *lead coordinator* dalam sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi lintas sektor pembangunan.

2. Mewujudkan Integrasi Program Berbasis RAPPP

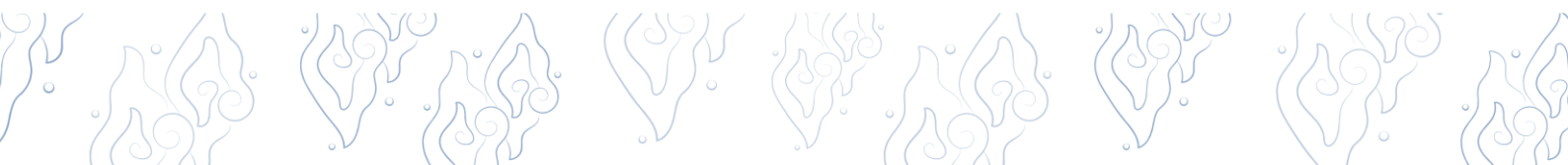
Menjamin seluruh program dan kegiatan pembangunan di Papua Barat Daya terintegrasi secara konsisten dengan RIPPP dan RAPPP, baik pada level pusat maupun daerah.

3. Penguatan Sistem Data dan Perencanaan Berbasis Bukti

Mengembangkan sistem data yang terintegrasi dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi kinerja pembangunan.

4. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar

Mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia di Papua Barat Daya.



5. Penguatan Ekonomi Lokal dan Kemandirian Daerah

Mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal, memperkuat peran pelaku usaha OAP, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam daerah.

6. Penguatan Ketahanan Pangan dan Stabilitas Ekonomi

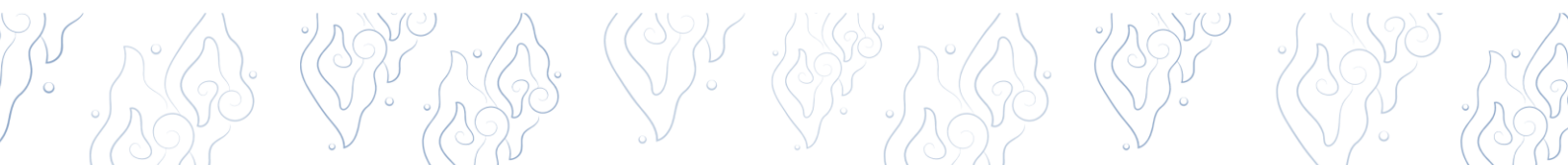
Menjamin ketersediaan pangan, memperkuat produksi lokal, serta menjaga stabilitas harga dan inflasi daerah.

7. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas SDM

Meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang lebih efektif.

8. Mendorong Stabilitas Sosial dan Papua Damai

Menghadirkan pendekatan terpadu dalam penanganan konflik dan gangguan keamanan, termasuk melalui pendekatan sosial, budaya, dan pembangunan wilayah, guna menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

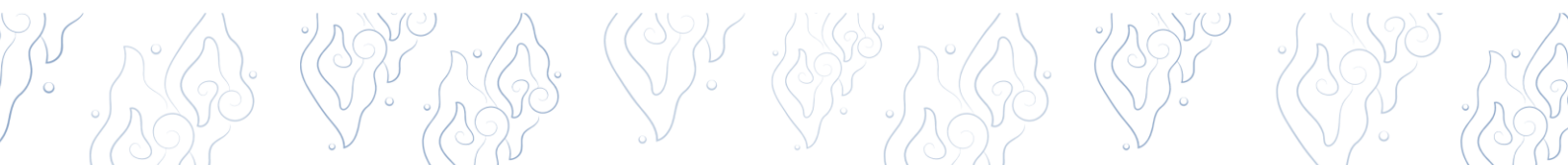
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode Maret 2026 menunjukkan bahwa peran Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) berjalan secara aktif dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya memperkuat koordinasi lintas sektor, tetapi juga menghasilkan pemetaan isu strategis, penguatan arah kebijakan, serta pengembangan model intervensi program yang lebih terintegrasi dan berbasis kebutuhan daerah.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada periode ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan koordinatif menuju pendekatan yang lebih strategis, berbasis data, dan berorientasi dampak.

Beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan dari pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

1. Menguatnya peran BP3OKP sebagai orkestrator pembangunan Papua, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah berbasis RIPP dan RAPP.
2. Terpetakannya isu-isu strategis pembangunan secara lebih komprehensif, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketahanan pangan, serta stabilitas sosial dan keamanan.
3. Terbangunnya model intervensi program terpadu di tingkat lokus, seperti integrasi program pendidikan dan gizi (SSH dan MBG), serta pengembangan ketahanan pangan berbasis kolaborasi lintas sektor.
4. Menguatnya arah kebijakan pengembangan ekonomi daerah, termasuk pemanfaatan potensi sumber daya alam, penguatan peran pelaku usaha OAP, serta peluang peningkatan PAD melalui sektor energi dan investasi.



5. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendekatan terpadu dalam menjaga stabilitas Papua Damai, termasuk dalam merespon dampak gangguan keamanan di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Maybrat.

Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait integrasi program lintas sektor, penguatan tata kelola data, peningkatan kualitas layanan dasar, serta stabilitas sosial dan keamanan sebagai prasyarat pembangunan.

5.2 Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut atas capaian, permasalahan, dan tantangan yang telah diidentifikasi, direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Peran BPP dalam Tusi SHEK

- a. Memperkuat posisi BP3OKP sebagai *lead coordinator* dalam mengorkestrasi sinkronisasi program percepatan pembangunan Papua.
- b. Mendorong optimalisasi fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di daerah.

2. Penguatan Integrasi Program Berbasis RIPPP dan RAPPP

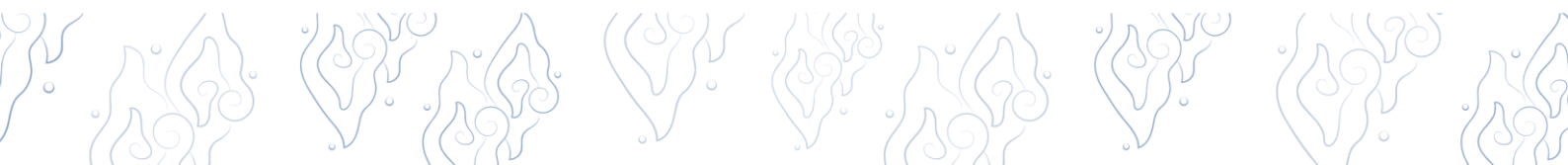
- a. Memastikan seluruh program pembangunan di Papua Barat Daya terintegrasi dalam kerangka RIPPP dan RAPPP.
- b. Mendorong konsistensi integrasi program ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD).

3. Penguatan Sistem Data dan Perencanaan Berbasis Bukti

- a. Mendorong penguatan sistem pengelolaan data yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- b. Mengoptimalkan penggunaan data sebagai dasar perumusan kebijakan dan evaluasi kinerja pembangunan.

4. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar

- a. Mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses.
- b. Mendukung penguatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.



5. Penguatan Ekonomi Lokal dan Kemandirian Daerah

- a. Mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal serta peningkatan peran pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP).
- b. Mempercepat pengembangan sektor strategis, termasuk energi, industri, dan kawasan ekonomi khusus.

6. Penguatan Ketahanan Pangan dan Stabilitas Ekonomi

- a. Mendorong peningkatan produksi pangan lokal dan penguatan sistem distribusi pangan.
- b. Menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi daerah melalui koordinasi lintas sektor.

7. Penguatan Stabilitas Sosial dan Papua Damai

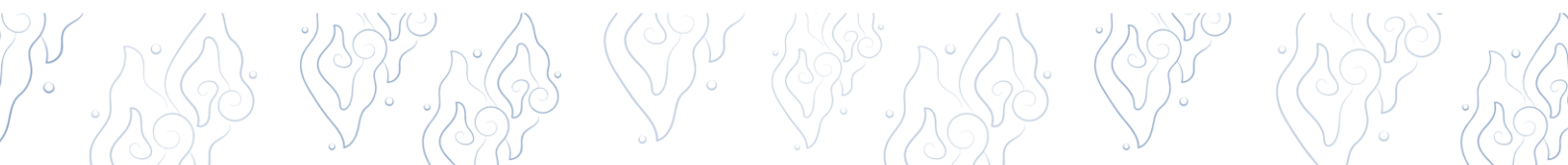
- a. Mendorong pendekatan terpadu dalam penanganan konflik dan gangguan keamanan melalui sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, dan masyarakat.
- b. Mendukung pemulihan wilayah terdampak konflik melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan pembangunan layanan dasar.

8. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Berbasis Kinerja

- a. Mendorong pelaksanaan monitoring dan evaluasi program secara berkala berbasis indikator kinerja yang terukur.
- b. Mengoptimalkan peran BP3OKP dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan program percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.

5.3 Penutup

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Maret 2026 ini menggambarkan dinamika pelaksanaan percepatan pembangunan yang semakin kompleks, namun juga menunjukkan arah penguatan peran BP3OKP sebagai aktor strategis dalam pengawalan kebijakan pembangunan Papua.



Diharapkan laporan ini dapat menjadi:

1. Bahan evaluasi bagi pimpinan dan pemangku kepentingan;
2. Dasar pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
3. Instrumen penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan.

Ke depan, percepatan pembangunan di Papua Barat Daya memerlukan pendekatan yang semakin adaptif, terintegrasi, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Penguatan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan data yang akurat, serta keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP) menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan pembangunan.

Dengan komitmen tersebut, Badan Pengarah Papua Barat Daya akan terus menjalankan peran strategisnya dalam mengawal implementasi kebijakan percepatan pembangunan Papua agar tetap selaras dengan arah pembangunan nasional, serta mampu menghadirkan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan.